

PENANGANAN *WOMEN TRAFFICKING* DI INDIA

PADA TAHUN 2018-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

ARSELY AULIA PUTRI SULISTIO

19323188

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

PENANGANAN *WOMEN TRAFFICKING* DI INDIA

PADA TAHUN 2018-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

ARSELY AULIA PUTRI SULISTIO

19323188

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

Penanganan *Women Trafficking* di India pada Tahun 2018-2023

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan
Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.
- 2 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.
- 3 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.

Tanda Tangan

Karina
Masitoh Nur Rohma

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

17 April 2025



Arselly Aulia Putri Sulistio

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR DAN FIGUR	v
ABSTRAK	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Cakupan penelitian	8
1.5 Tinjauan Pustaka	9
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.7 Argumen Sementara	16
1.8 Metode Penelitian	18
<i>1.8.1 Jenis Penelitian</i>	18
<i>1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian</i>	19
<i>1.8.3 Metode Pengumpulan Data</i>	19
<i>1.8.4 Proses Penelitian</i>	19
1.9 Sistematika Pembahasan	20
BAB 2 Kekerasan terhadap perempuan dan <i>Women Trafficking</i>	22
2.1. Dinamika Women Trafficking di India	21
Grafik 1 Korban Perdagangan Manusia Mayoritas Perempuan di India	22
Grafik 2 Kekerasan Terhadap Perempuan India 2018-2022	24
2.2 Kekerasan terhadap Perempuan di India	31
2.3 Minimnya Upaya Pemerintah India dalam Menanggulangi <i>Women Trafficking</i>	35
BAB 3 Analisis Kasus <i>Women Trafficking</i> di India Menggunakan Ketiga Aspek Feminisme Empiris, Analitis, Normatif	46
3.1. Analisis Feminisme Empiris dalam menjelaskan Dinamika <i>Women Trafficking</i> di India	46

3.2 Analisis Feminisme Analisis dalam Menjelaskan Kekerasan pada Perempuan di India	49
3.3 Analisis Feminisme Normatif dalam Menjelaskan Minimnya Upaya Pemerintah India terkait <i>Women Trafficking</i>	55
BAB 4 PENUTUP	60
4.1. Kesimpulan	60
4.2 Rekomendasi	63
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL, GRAFIK, DIAGRAM, GAMBAR DAN FIGUR

Grafik 1 Korban Perdagangan Manusia Mayoritas Perempuan	22
Grafik 2 Kekerasan terhadap Perempuan India 2018-2022	23
Tabel 1 Analisis Empiris, Analitis, dan Normatif pada Kasus <i>Women trafficking</i> di India	60

DAFTAR SINGKATAN

AHTU	: Anti Human Trafficking Unit
CEDAW	: Convention on Elimination of All forms of Discrimination against Women
GFW	: The Global Fund for women
HAM	: Hak Asasi Manusia
IPC	: India Penal Code
NCRB	: National Crime Records Bureau
TIP	: Trafficking in Person
UNTOC	: United Nation Convention on Transnational Organized Crime
UNODC	: United Nation Office on Drugs and Crime

ABSTRAK

Fenomena *women trafficking* merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di India dan tidak kunjung usai. Tingginya jumlah kasus dan sejarah yang kompleks, dan budaya melengkapi dinamika struktur sosial yang ada. Adanya pengaruh feminis, serta tantangan dari kekerasan gender yang mempengaruhi tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan pada perempuan ditinjau dari adanya kebijakan pemerintah India yang masih minim, dan dianggap belum dapat meminimalisir dari adanya diskriminasi terhadap perempuan, bahkan kasus kekerasan paling parah yaitu pembunuhan. Bahwasanya *women trafficking* dapat terjadi karena ketidaksetaraan gender dan juga laki-laki yang menjadi pelaku utama *women trafficking*. Penulisan ini akan membahas terkait Tinjauan Aspek-aspek feminisme dalam penanggulangan *women trafficking* di India pada tahun 2018-2023. Dalam menganalisis permasalahan yang ada, penelitian ini akan menggunakan teori Feminisme dari Jacqui True.

Kata-kata kunci: Perempuan India, *women trafficking*, gender, kekerasan.

ABSTRACT

The phenomenon of women trafficking is one form of human rights violation that occurs in India and has not ended. The high number of cases and complex history, and culture complement the dynamics of the existing social structure. The influence of feminists, as well as the challenges of gender violence that influence the high level of violence against women. Violence against women is reviewed from the existence of Indian government policies that are still minimal, and are considered unable to minimize discrimination against women, even the most severe cases of violence, namely murder. That women trafficking can occur due to gender inequality and also men who are the main perpetrators of women trafficking. This writing will discuss the Review of Aspects of Feminism in overcoming women trafficking in India in 2018-2023. In analyzing the existing problems, this study will use the Feminism theory of Jacqui True.

Keywords: Indian women, women trafficking, gender, violence.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Feminisme merupakan sebuah paham atau gerakan perempuan yang menuntut dasar emansipasi atau kesamaan dan keadilan antara hak laki-laki dengan perempuan. Adanya feminisme diawali dengan persepsi tentang ketimpangan posisi perempuan dibanding laki-laki di masyarakat sehingga timbulah upaya untuk mencari penyebab dari ketimpangan untuk menemukan cara dalam penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang yang sesuai dengan potensi sebagai manusia. Feminisme mengacu pada gerakan sosial yang dilakukan baik oleh kaum perempuan maupun laki-laki untuk meningkatkan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki (Hidayati, 2018).

Selama bertahun-tahun, India menjadi negara asal, transit, dan tujuan bagi perdagangan perempuan, baik untuk eksploitasi seksual komersial maupun tenaga kerja paksa. Perdagangan manusia, khususnya perempuan telah menjadi masalah yang sangat memprihatinkan di India. Jenis perdagangan yang paling umum adalah perdagangan tenaga kerja dan yang kedua adalah perdagangan seks (kawin paksa, pengemis paksa, dan aktivitas kriminal paksa merupakan bentuk lain dari perdagangan manusia yang ditemukan di India). Mayoritas korban dari perdagangan seks adalah perempuan dan anak perempuan. Pelaku perdagangan manusia akan menipu gadis-gadis dengan janji pekerjaan yang bagus, memikat mereka dengan hubungan romantis palsu, membelinya dari keluarga miskin, atau bahkan menculik mereka (Vidushy, 2016).

Salah satu isu sosial yang sejak lama terjadi di India adalah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Kondisi ini menyebabkan terjadi banyak kasus perdagangan manusia ke negara-negara tetangga maupun di dalam negeri India sendiri. Perempuan merupakan objek utama dari para *traffickers* dalam kegiatan perdagangan manusia tersebut. Konstitusi India menjamin persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang gender. Namun, hal ini belum dapat disadari oleh seluruh masyarakat dan tidak dapat mengakhiri diskriminasi gender (Kuppusamy, 2021).

India dianggap sebagai negara paling berbahaya di dunia bagi perempuan, menurut jejak pendapat oleh *Thomson Reuters Foundation*. Survei tersebut menempatkan India sebagai negara yang lebih berbahaya bagi perempuan daripada Afghanistan dan Suriah yang dilanda perang, yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga. India juga dipandang lebih berbahaya bagi perempuan dibandingkan Somalia, yang berada di peringkat keempat dan telah terjerumus dalam konflik sejak 1991, dan Yaman yang berada di peringkat kedelapan dan sedang menderita krisis kemanusiaan yang mendesak (Canton, 2018).

India menjadi negara terburuk secara keseluruhan, dan khususnya terburuk bagi perempuan dalam hal perdagangan manusia, kekerasan seksual dan terkait dengan tradisi budaya agama, dan suku. Sebanyak 548 pakar global tentang isu perempuan, 43 di antaranya berbasis di India, yang berkaitan dengan risiko yang dihadapi perempuan dalam enam bidang yaitu perawatan kesehatan, akses ke sumber daya ekonomi dan diskriminasi, praktik adat, kekerasan seksual, kekerasan non seksual, dan perdagangan manusia. *Thomson Reuters* melakukan

jajak pendapat yang sama pada tahun 2011, India berada di peringkat keempat di atas Pakistan. Namun, pada tahun 2018 Pakistan berada di peringkat keenam, dianggap lebih aman bagi perempuan daripada India (Canton, 2018).

Pada tahun 2012 terjadi protes di India setelah pemerkosaan massal di Delhi, meskipun undang-undang baru telah diperkenalkan, masih banyak perempuan yang melaporkan kejahatan seksual. India secara khusus menempati peringkat sebagai negara yang paling berbahaya untuk kekerasan seksual terhadap perempuan, yang meliputi pemerkosaan dalam rumah tangga, pemerkosaan oleh orang asing, pelecehan seksual, dan kurangnya akses terhadap keadilan dalam kasus pemerkosaan (Canton, 2018).

Data dari *Trafficking in Persons report* pada tahun 2022 menjelaskan bahwa korban perdagangan manusia 41 persennya adalah anak-anak dan 59 persennya adalah perempuan. Laporan TIP menyatakan bahwa ada ketidakamanan pangan dan juga pengangguran yang disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19 yang berarti anak-anak, terutama perempuan menghadapi resiko peningkatan perdagangan seperti eksploitasi seksual dan kerja paksa. TIP mengkonfirmasi juga bahwa pandemi menciptakan situasi yang berbahaya bagi anak perempuan yang sudah berisiko didiskriminasi (Invisible Girl Project, 2022).

Pemerintah belum dapat sepenuhnya mengatasi masalah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Kondisi ini menyebabkan banyaknya terjadi kasus perdagangan manusia ke negara-negara tetangga maupun di dalam negeri India sendiri. Perempuan merupakan objek utama dari para *traffickers* dalam kegiatan perdagangan manusia tersebut. Masalah perdagangan perempuan di India

bukanlah hal yang baru, namun sudah menjadi masalah nasional dan internasional yang semakin berlarut-larut (Harnoko, 2010).

Tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi dikarenakan keyakinan dalam masyarakat adanya budaya dominasi, yang dimana laki-laki merupakan superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dibenarkan untuk menguasai dan juga mengontrol perempuan. Selain itu juga terdapat interpretasi yang keliru terhadap pandangan gender yang tersosialisasi dalam masyarakat yang menganggap bahwa perempuan lemah, sedangkan laki-laki umumnya lebih kuat. Kondisi perempuan yang masih sangat rentan terhadap berbagai macam bentuk tindak kekerasan baik di ranah publik maupun juga domestik. Perempuan sebagai makhluk yang seharusnya disayangi dan dilindungi, namun justru menjadi objek dari kekerasan yang dilakukan oleh para laki-laki yang berada sangat dekat dengan mereka. Feminisme menganggap kekerasan terhadap perempuan ini sama dengan kekerasan berbasis gender. Persamaan tersebut dikarenakan selama ini kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan terjadi karena banyaknya perbedaan relasi gender yang timpang dan adanya kekerasan berbasis gender ini adalah hasil bentukan interaksi sosial yang terjadi di dalam masyarakat patriarki atau sistem yang didominasi dan dikuasai oleh laki-laki (Harnoko, 2010).

Pemerintah India terus berhadapan dengan kekerasan yang merupakan hasil dari berbagai faktor termasuk sistem patriarki dan kasta yang terlanjur mengakar dan terus berlanjut pada adanya diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya dilakukan dan berfokus pada penegakan hukum atau kekerasan langsung, namun juga bisa mengatasi masalah kekerasan struktural dan kultural yang terjadi di India. Pendekatan yang menyeluruh dan terkoordinasi

dalam sistem hukum yang dapat membantu perempuan untuk dapat keluar dari kekerasan struktural dan kultural (Lukitowati, 2017).

Feminisme memandang bahwa dalam kasus yang ada di India merupakan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) pada perempuan yang tidak dapat ditolerir karena nilai budaya yang dijadikan suatu kebenaran dalam melakukan kekerasan terhadap perempuan. Feminisme menganggap bahwa penyimpangan dari tujuan awal dari budaya para era modern menjadi pemahaman yang turun-temurun. India tercatat sebagai salah satu dari negara yang memiliki tingkat pelanggaran HAM tertinggi di dunia khususnya pada perempuan. Salah satu faktor yang membuat India menjadi negara dengan kasus ketidaksetaraan yang cukup tinggi dikarenakan pengaruh sosial budaya yang mendukung bahwa laki-laki memiliki kekuatan daripada perempuan. Bentuk dari pelanggaran HAM di India yaitu prostitusi di dunia yang khususnya pada perempuan. Kasus dari pelanggaran HAM di India yang khususnya pada kaum perempuan yang masih terjadi dan masih menjadi masalah sampai saat ini dilihat dari banyaknya bukti dan masih berlakunya praktik prostitusi, meningkatnya kasus *dowry murder* yaitu dimana pernikahan dianggap sebagai prostitusi legal yang bertujuan untuk menaikkan kasta perempuan yang menjadi pemicu dalam meningkatnya kasus pembunuhan kepada perempuan. Selain itu, adanya tekanan psikologis yang dirasakan oleh perempuan menjadi salah satu faktor utama pemicu tingginya angka kematian akibat kasus bunuh diri (Lukitowati, 2017).

Tradisi di India yang seharusnya menghasilkan sisi positif menjadi budaya yang negatif karena adanya ketimpangan sosial dan juga ekonomi yang masih mengakar dan membudaya yang terjadi di India dan menjadi suatu kebenaran.

Seperti adanya bentuk kriminalitas yang terjadi terhadap perempuan di India yang penyebab utamanya adalah kurangnya perlindungan hak-hak perempuan. Dukungan oleh organisasi internasional dan aktivis-aktivis pejuang hak-hak perempuan di India yang berlandaskan perspektif feminisme yang dimana para pejuang feminisme mempertahankan kepercayaan bahwa perempuan harus dilindungi serta memiliki kesetaraan dengan laki-laki atau kesetaraan gender (Oktaviani and Setiawati, 2017).

Kekerasan pada perempuan seperti dominasi yang dilakukan laki-laki kepada perempuan bukan hanya bersifat psikologis maupun pelecehan, tetapi seperti serangan secara fisik seperti pemerkosaan, pemukulan, penyiksaan dan bahkan pembunuhan. Dalam menganalisis kasus diskriminasi gender di India pemerintah India tidak dapat diselesaikan sendiri oleh pemerintah India. Hal ini menjadi sorotan dalam negeri dan juga dunia internasional ketika jumlah diskriminasi pada perempuan terus bertambah. Pemerintah India mengambil peran di negaranya dengan cara bekerjasama dengan organisasi Internasional seperti UN Women. UN Women merupakan salah satu badan PBB yang mengenai pada kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan UN Women telah menunjukkan bahwa organisasi Internasional mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah dan membantu kehidupan perempuan dalam mengurangi jumlah kasus-kasus diskriminasi perempuan melalui beberapa agenda yang dilakukan oleh organisasi internasional di India.

Sejak tahun 1980-an, para sarjana feminis Hubungan Internasional telah memberikan pandangan yang menarik tentang politik global. Hubungan Internasional memiliki peran penting bagi pola gender, seperti halnya gender yang

telah mempengaruhi proses globalisasi ekonomi dan juga militer. Berfokus pada politik yang ingin menghilangkan adanya asumsi bahwasanya kekuasaan adalah bentuk yang keluar dari senjata dan kemudian terjadinya deklarasi dari pemimpin dunia. Upaya feminis menafsirkan kembali sebuah kekuasaan menunjukkan bahwasanya sarjana Hubungan Internasional memproduksi kekuasaan yang sangat tidak merata dan juga hierarkis (True 2005, 213-214).

Sehingga feminis menginginkan rekonseptualisasi tentang kekuasaan dalam hubungan internasional yang bahwasanya fenomena politik baru dengan gender memiliki pengaruh terhadap dunia internasional. Dengan fokus kepada aktor negara, masyarakat perempuan yang terpinggirkan dan juga konseptualisasi alternatif dari kekuasaan, membuat perspektif feminis membawa pemikiran dan tindakan baru di ranah politik. Sementara tantangan feminis terhadap Hubungan Internasional dimana sangat banyak yang mempertimbangkan isu-isu atau perspektif gender. Sehingga banyak dari kontribusi feminis yang berusaha untuk mendekonstruksi dari penjelasan politik kekuasaan yang mendominasi dalam Hubungan Internasional (True 2005, 214).

Dalam buku ini, feminisme dibedakan menjadi tiga yaitu feminisme empiris yang memiliki fokus pada mengeksplorasi gender sebagai bentuk dimensi empiris dalam hubungan internasional, yang kedua feminisme analitis yaitu gender sebagai kategori teoritis dari ide dalam konsep hubungan internasional di aspek konstitutif hubungan internasional, dan ketiga feminisme normatif yaitu mencerminkan proses teori dalam agenda normatif untuk perubahan sosial dan politik. Sejak tahun 1980-an sarjana hubungan internasional feminis telah memberikan sebuah wawasan mengenai tatanan politik global, seperti dinamika

gender yang memiliki pengaruh dalam aspek ekonomi, militer, gerakan internasional gender, serta memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik nasional maupun internasional (True 2005, 215).

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penanganan *women trafficking* di India pada tahun 2018-2023 ditinjau dari perspektif feminisme?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis perspektif feminisme dalam menjelaskan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun *women trafficking* di India pada tahun 2018-2023.

1.4 Cakupan penelitian

Fokus dari penulisan ini adalah bagaimana kebijakan pemerintahan India dalam menanggulangi kasus *women trafficking* yang terjadi. Menjelaskan *women trafficking* merupakan kekerasan yang sangat fatal karena perempuan dan anak-anak menjadi korban. Penelitian ini mengambil lingkup waktu pada tahun 2018-2023 karena pada tahun 2018 India menduduki peringkat pertama dan merupakan negara dengan banyak kasus perdagangan manusia masih banyak terjadi dengan berbagai macam bentuk. Tahun itu juga adalah di mana terjadi kecenderungan peningkatan jumlah korban *women trafficking* yang menjadi

masalah dalam negeri yang menarik banyak perhatian publik bahkan sampai ke internasional (McCarthy, 2018).

Berdasarkan data *Global Report on Trafficking in Person 2020* yang dikeluarkan oleh United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC), pada 2018 terdapat 50% kasus perdagangan manusia berbentuk eksploitasi seksual, 38% dalam bentuk kerja paksa, 6% kasus aktivitas kriminal, 1,5% kasus pengemis, dan 1% kasus pernikahan paksa. Mengacu pada Global Slavery Index 2018 India ternyata memiliki prevalensi perbudakan modern sebesar 6,1 per 1.000 penduduk. Dengan demikian, banyaknya jumlah korban perbudakan modern di India saat itu mencapai 7.989.000 orang. Angka tersebut bukanlah angka yang kecil dengan bentuk tipe kejahatan seperti *women trafficking* ini yang kemudian menjadi kejahatan terorganisir terbesar kedua di India. Melansir dari laman India Times (2021), orang-orang di India dengan secara rutin diperdagangkan secara ilegal untuk dijadikan pekerja seks komersial atau kerja paksa lainnya. Menurut Global Slavery Index 2018 di bawah India ada China terdapat 3.864.000 korban perbudakan di China, yang prevalensinya 2,8 per 1.000 penduduk. Dapat dilihat dari laporan perdagangan manusia di China. Selain itu, Pakistan sebagai negara yang terletak di Asia Selatan ini memiliki prevalensi perbudakan modern sebesar 16,8 per 1.000 penduduk dan terdapat 3.186.000 orang yang tercatat sebagai korbannya (Pratiwi, 2022).

Sehingga Penulis mengambil India pada tahun 2018-2023 yang dikarenakan tahun 2023 merupakan tahun terakhir dengan data dan laporan yang sudah lengkap dan dapat diverifikasi. Banyak organisasi internasional seperti IOM, UNODC merilis laporan tahunan mereka hingga akhir 2023. Sementara data

di tahun 2024 masih bersifat parsial dan belum bisa digunakan secara utuh. Selain itu transisi pasca pandemi COVID-19 di mana India mulai memulihkan ekonomi dan sistem sosialnya, dikarenakan banyak korban *women trafficking* berasal dari kelompok yang terdampak secara ekonomi dan 2023 menandai fase pemulihan dan perubahan pola *trafficking* baru. Dengan mengambil periode hingga 2023 dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan dan kerja sama yang dimulai sejak 2018. Selain itu, dengan adanya maskulinitas yang dilakukan oleh laki-laki dapat menyebabkan peningkatan *women trafficking* di India. Penulis memilih India sebagai negara yang dianalisis dikarenakan melihat upaya pemerintah India memasukan perspektif gender ke sektor-sektornya pada pemerintahannya untuk menanggulangi kekerasan pada perempuan India.

1.5 Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini penulis mencoba untuk mengaitkan beberapa karya ilmiah terdahulu, sehingga akan didapatkan keterkaitan dengan karya ilmiah milik penulis. Adapun karya ilmiah yang digunakan sebagai bahan rujukan penulis yang pertama adalah jurnal yang berjudul *Women's Trafficking in Twenty-first Century India: A Quest for Regional Variations* (2021) karya bhaswati pal dan Tarun Kumar Modal menjelaskan *women trafficking* di India dari tahun 2001 hingga 2015, faktor-faktor seperti tradisi sejarah, keterbelakangan sosial-ekonomi, dan kekakuan budaya diidentifikasi sebagai penyebab variasi regional dalam *women trafficking*. Contoh yang diberikan artikel ini yaitu pengaruh dari tingginya tingkat kesadaran dan pemberdayaan perempuan sebagai

kunci utama untuk memberantas *women trafficking* selain dari ketentuan hukum dan keterlibatan aktif oleh NGO (Pal and Modal 2021, 130-151).

Kemudian dalam tulisan lain melalui jurnal yang ditulis oleh Arpana Bansal yang berjudul *a critical analysis of human trafficking in India* (2021) menjelaskan perdagangan manusia dianggap sebagai kejahatan terorganisir terbesar kedua di India. Perdagangan manusia masih menjadi isu utama di India, meskipun fakta bahwa itu dilarang di bawah hukum India orang-orang secara rutin diperdagangkan secara ilegal melalui India untuk seks komersial, eksploitasi dan kerja paksa atau terikat Hasil dari jurnal tersebut menunjukkan terdapat jelas perlunya kesadaran tentang perdagangan manusia dan konsekuensinya mencegah untuk menjadi korban dari perdagangan manusia dengan menegakkan hukum-hukum sehingga banyak orang yang dapat diselamatkan dari kejahatan sosial ini (Bansal, 2021).

Masuk ke dalam lingkup pembahasan yang lebih luas keterkaitan kekerasan kepada perempuan sebagaimana yang ditulis dengan judul *Peningkatan Kasus Perdagangan Perempuan di India dalam Perspektif Feminisme* (2023) yang ditulis oleh Rafi Nuryantoro Putri menganalisis bahwa kegagalan dalam menangani perdagangan perempuan di India dapat dijelaskan oleh pendekatan feminis empiris melalui tiga faktor yaitu tidak adanya perempuan dalam pemerintahan, dominasi patriarki dalam pengambilan keputusan, dan kurangnya kebijakan yang pro-perempuan dalam pengambilan keputusan tentang isu perdagangan perempuan. kultur patriarki yang menyebabkan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dengan perempuan, kekerasan yang terjadi korbannya adalah perempuan. Dari hasil analisis yang dilakukan oleh penulis,

dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan dalam ranah apapun, yang menjadi penyebab utamanya adalah ketimpangan historis dari pola hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan oleh laki-laki dan menjadi hambatan kemajuan bagi mereka, yang telah melembaga seperti dalam ruang-ruang kehidupan masyarakat melalui penempatan posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas dalam segala relasi segala relasi antar manusia, seperti ruang publik maupun domestik penelitian tersebut membahas faktor yang mempengaruhi dan mendukung terjadinya diskriminasi pada wanita dan berujung pada *women trafficking*. Hasil tersebut menjadi referensi penelitian yang akan dilakukan di mana pada penelitian akan dimasukkan kasus ketimpangan gender yang terjadi di India (Nuryantoro, 2023).

Jurnal yang ditulis Shreshth Bhatnagar dengan judul *Prevalence of Prostitution and Women Trafficking in India: Hindrance of Fundamental Rights* (2022) memberikan penjelasan prevalensi prostitusi dan perdagangan perempuan di India sebagai hambatan terhadap hak-hak dasar. Ketimpangan gender dan kelemahan dalam sistem hukum yang mempersulit pemberantasan *women trafficking*. Dominasi laki-laki dan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat, yang mengakibatkan sistem diktator yang mempersulit penghapusan *women trafficking* dan prostitusi serta lemahnya undang-undang saat ini, penelitian ini menyoroti kurangnya kerangka hukum dalam menanggulangi *women trafficking*.

Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa beberapa faktor tingginya kasus perdagangan orang yang pada umumnya perempuan yang disebabkan oleh dominasi laki-laki sehingga membuat perempuan menjadi tidak punya banyak pilihan untuk menyambung hidup. Didalamnya mencakup tanggung jawab

negara bersama-sama dengan organisasi non pemerintah untuk melakukan pendampingan korban-korban *trafficking*, memberikan pelayanan hukum dan mengusahakan pemulihan kondisi korban, baik secara fisik, psikologis maupun pemulihan secara sosial. Oleh karena itu jurnal membahas seperti perdagangan perempuan melalui hukum yang masih lemah, faktor yang mempengaruhi, perlindungan korban dan apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah perdagangan perempuan. (Bhatnagar 2022, 27-38).

Jurnal dengan judul *Studi Feminisme terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia di India* (2017) karya Suci, Lucky, Agita dan Nurul menjelaskan bahwa pemerintah India telah melakukan berbagai cara untuk melindungi hak-hak perempuan di India, dengan adanya dukungan oleh organisasi Internasional dan aktivis-aktivis pejuang hak-hak perempuan di India dengan berlandaskan perspektif feminisme. Dimana para pejuang feminisme mempertahankan kepercayaan mereka bahwa perempuan harus dilindungi serta memiliki kesetaraan dengan laki-laki atau kesetaraan gender. Dalam jurnal ini menjelaskan Kerjasama dari seluruh elemen baik itu pemerintah, organisasi Internasional, lembaga-lembaga, maupun masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya untuk mengatasi pelanggaran hak asasi di India.

Penelitian ini membahas mengenai penanganan, hukum, atau peraturan yang melindungi hak-hak perempuan, dan larangan untuk melakukan *women trafficking*. Berdasarkan penelitian tersebut, analisis lebih lanjut tentang peran masing-masing lembaga untuk menangani *women trafficking* dapat dikaji lebih lanjut dalam penelitian yang akan dilakukan. Penanganan-penanganan pada penelitian tersebut belum dikaitkan dengan teori feminisme, sehingga dalam

penelitian yang akan dilakukan teori tersebut akan digunakan untuk mengkaji upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh lembaga terkait.

Penelitian terdahulu mengumpulkan informasi tentang faktor yang menyebabkan terjadinya *women trafficking*. Faktor pendukung peningkatan kasus tersebut, dan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait di India. Penelitian yang akan dilakukan dengan menganalisis penanganan-penanganan kasus perdagangan perempuan di India berdasarkan perspektif feminisme. Faktor terjadinya perdagangan manusia terutama perempuan di India dilandasi oleh kemiskinan, kurangnya pendidikan, ketidaksetaraan gender, dan adanya budaya patriarki. Meskipun pemerintah telah menyusun peraturan tentang perlindungan perempuan. Kasus perdagangan perempuan masih terus terjadi dan tidak menunjukkan angka penurunan sehingga perlu diteliti lebih lanjut apakah penanganan kasus ini telah berhasil atau membutuhkan perbaikan.

Penelitian sebelumnya fokus pada faktor yang mendukung terjadinya perdagangan wanita dan upaya yang telah disusun oleh pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Namun, pada penelitian sebelumnya tidak disertakan analisis tentang bagaimana penanganan kasus berdasarkan perspektif feminisme dan kekerasan pada perempuan India. Kebanyakan dari penelitian sebelumnya memberikan hasil yang menyarankan tentang kesadaran hukum dan dukungan kampanye anti kekerasan perempuan dari pihak internasional.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan teori feminisme dari Jacqui True. Teori Feminisme dari Jacqui True menjelaskan teori feminisme berdasarkan pengamatan maupun pengalaman yang digunakan sebagai alat analisis untuk memahami sebuah hubungan dalam skala global dan untuk membangun tatanan dunia yang alternatif. Feminisme memiliki tujuan untuk memperkuat pengetahuan dalam hubungan internasional yang liberal dan realistis. Selain itu, tantangan feminis terhadap Hubungan Internasional yang dimana sangat banyak yang mempertimbangkan isu-isu maupun perspektif gender. Sehingga banyak dari kontribusi feminis yang berusaha menata ulang dari penjelasan politik kekuasaan yang mendominasi dalam Hubungan Internasional (True 2005, 213-214)

Feminisme dibedakan menjadi tiga bagian di dalam buku feminisme dalam hubungan internasional, yaitu: (1) Feminisme empiris, memiliki fokus pada mengeksplorasi gender sebagai bentuk dimensi empiris dalam hubungan internasional: (2) Feminisme analitis, gender sebagai kategori teoritis dari ide dalam konsep hubungan internasional di aspek konstitutif hubungan internasional: dan (3) Feminisme normatif, menggambarkan proses teori dalam agenda normatif untuk perubahan sosial dan politik. Sarjana Hubungan Internasional feminis telah memberikan sebuah wawasan mengenai tatanan politik global dan dinamika gender memiliki pengaruh dalam aspek ekonomi, militer gerakan internasional gender, dan juga memiliki pengaruh besar dalam dinamika politik nasional maupun internasional (True 2005, 215).

Feminisme empiris yaitu di mana di dunia telah mengalihkan perhatian kepada perempuan dan juga gender dalam dunia internasional. Feminis memiliki

tantangan besar pada dunia internasional. Perempuan memiliki berbagai kemampuan yang seharusnya dibutuhkan di sistem pemerintahan maupun tatanan dunia global karena selalu dikecualikan yang akibatnya banyak yang memandang bahwasanya maskulinitas yang terjadi di dalam tatanan politik maupun global yang hanya dapat menjelaskan realitas politik dunia yang terjadi. Jacqui True menuliskan feminisme empiris untuk dapat mengoreksi dari adanya representasi perempuan karena adanya asumsi yang salah yaitu bahwasanya pengalaman laki-laki dapat diperhitungkan dibandingkan dengan perempuan yang kurang relevan untuk andil dalam kegiatan yang biasanya dilakukan oleh laki-laki (True 2005, 216-217).

Feminisme analitis, yang dalam hal ini merupakan gagasan mengenai kekuasaan, otonomi, kedaulatan, keamanan, serta pengelompokan analisis dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat dipisahkan dari gender, baik dalam ruang publik maupun pribadi yang telah dilembagakan oleh negara maupun lintas negara. Postmodernisme memandang bahwa gender merupakan kategori yang dibangun secara sosial, sedangkan maskulinitas selalu dikaitkan dengan otonomi, kedaulatan, universalisme, dan juga kapasitas. Feminis selalu kurang dari karakteristik ini, hal tersebutlah yang menjadi contoh di mana militer yang lebih dominan dengan laki-laki yang dipresentasikan untuk melindungi wanita dan anak-anak (True 2005, 222-224).

Feminisme normatif, dalam hal ini yaitu pemerintah memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan gender, dalam hal ini yang paling parah dapat menyebabkan dari terjadinya pembunuhan. Pemerintah India memberikan kebijakan agar dapat meminimalisir adanya korban dari women trafficking seperti

mendirikan Anti Human trafficking Unit (AHTU) yang dibentuk secara hukum untuk mengatasi isu *women trafficking*. India juga berupaya untuk mengatasinya dengan cara ikut serta dalam keanggotaan UNTOC dan menyetujui adanya protokol Palermo, yang dimaksudkan adalah agar masyarakat dapat hidup dengan aman dan nyaman, terutama bagi, terutama bagi perempuan yang menjadi objek utama dari adanya kasus *women trafficking* (True 2005, 228-230).

Dapat disimpulkan dari ketiga analisis teori feminisme dari Jacqui True yaitu; Feminisme empiris memiliki peran dalam dunia Hubungan Internasional dan bergantung pada peran gender sebagai konstruksi analitis agar dapat menjelaskan marginalisasi perempuan dalam dunia hubungan internasional, Feminisme analitis menjelaskan gender sebagai konstruksi sosial adanya kasus penindasan terhadap perempuan. Sedangkan feminisme normatif merupakan paduan dalam hal ini semua aspek teori feminis adalah normatif, agar dapat membantu makna serta interpretasi tertentu yang terdapat dalam teori Hubungan Internasional. Para kaum feminis menyatakan diri secara eksplisit bagaimana mereka berteori dan juga memasuki bidang regional dan internasional untuk melakukan penelitian, dikarenakan kaum feminis memandang politik, subjektivitas dan konteks merupakan bagian dari penjelasan teoritis (True 2005, 332).

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini penulis memiliki argumen sementara bahwasannya Pemerintah India membuat kebijakan yang memiliki tujuan untuk menghentikan *women trafficking* yang terjadi. Variabel-variabel dari teori Feminisme Jacqui

True, apabila dikaitkan dengan apa yang terjadi di India mengenai *women trafficking* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Feminisme empiris, dalam hal ini harus dapat mempresentasikan perempuan dengan baik dari adanya stigma yang salah, seperti mengenai pengalaman laki-laki jauh diperhitungkan dibandingkan perempuan. Karena dianggap kurang relevan dalam mengerjakan sesuatu yang selalu dilakukan oleh laki-laki. Hal tersebut yang membuat perempuan ditempatkan pada posisi di bawah laki-laki, sehingga rentan dieksploitasi seperti menjadi korban *trafficking*.
2. Feminisme analitis, adanya pengelompokan yang terjadi dan sudah menjadi tradisi oleh masyarakat India seperti kebiasaan khususnya laki-laki, membuat gagasan mengenai otonomi, kekuasaan, keamanan yang tidak terlepas dari gender. Karena pembagian kelompok antara perempuan dan laki-laki di India terjadi secara sosial yang terjadi sejak penjajahan Inggris. Sebagai contoh, kebutuhan tidak hanya tercukupi dengan adanya pendapatan utama, yaitu pendapatan laki-laki. Sehingga perempuan juga melakukan migrasi dengan menjadi tenaga kerja. Pemerintah menganggap *women trafficking* menjadi ancaman bagi keamanan manusia, keamanan ekonomi, keamanan komunitas dan keamanan personal bagi perempuan. Keamanan seharusnya menjadi tanggung jawab negara dan tanggung jawab internasional.
3. Feminisme normatif, dalam hal ini pemerintah india membuat kebijakan bahwasanya peran perempuan juga dibutuhkan di segala aspek di negara, karena peran serta perubahan yang dilakukan oleh perempuan sangat memberikan dampak besar bagi negara, maka dalam feminisme normatif yang

memiliki penjelasan bahwasanya peran politik, stigma, serta bagaimana mereka ber teori mengenai gender akan diubah karena itu hanyalah sebuah penjelasan secara teoritis. menempatkan perempuan di segala aspek di negara, karena peran serta perubahan yang dibutuhkan dapat dilakukan oleh perempuan memberikan dampak yang sangat besar bagi negara.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Metode yang akan digunakan oleh penulis dalam menyusun penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang akan menggunakan penelitian berdasarkan *library research* atau studi kepustakaan. Menurut M. Rosyid dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hubungan Internasional penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan berbagai fakta hubungan fenomena yang sedang diselidiki secara sistematis, akurat dan faktual. Dengan demikian metode ini juga diartikan sebagai suatu upaya penyelidikan dari masalah yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan subjek maupun objek penelitian secara apa adanya, sesuai dengan bentuk fakta yang tersedia.

Hubungan internasional merupakan studi sosial yang diketahui bahwa penelitian kualitatif merupakan metode yang sering digunakan dalam penelitian ilmu sosial dan ilmu politik, oleh karena itu penulis melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengkaji pustaka melalui beberapa sumber yang terkait dengan *women trafficking* di India.

1.8.2 *Subjek dan Objek Penelitian*

Subjek dari penelitian ini adalah kekerasan dan objeknya adalah perempuan di India selaku korban dari kekerasan maupun *women trafficking*. Bagaimana menyikapi atas banyaknya kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi oleh perempuan dengan kekerasan yang ada. Hal ini yang akan dijadikan sebuah objek dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

1.8.3 *Metode Pengumpulan Data*

Dalam penelitian ini data yang dibutuhkan peneliti bersumber dari buku-buku elektronik, jurnal, artikel, dokumen resmi, serta media *online*. Penulis juga mengutip pernyataan-pernyataan dari aktor pemerintah maupun pemerintah melalui artikel online. Data yang akan digunakan penulis berupa primer dan sekunder. Dari data-data tersebut kemudian akan digunakan penulis berupa primer dan sekunder. Dari data-data tersebut kemudian akan diolah dengan menggunakan konsep ketidaksetaraan gender dan feminisme yang telah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya.

1.8.4 *Proses Penelitian*

Proses dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah dan bertahap. Tahap pertama diawali dengan pengumpulan data, menentukan rumusan masalah, Menyusun kerangka teori, tujuan penelitian, dan rancangan penelitian hingga pengumpulan data serta menganalisis. Kemudian tahap selanjutnya adalah penulis menganalisis terkait dengan permasalahan yang ditemukan serta mencari solusi, penulis akan mencari dan menggali data-data utama yang akan membantu, sehingga data-data penelitian yang telah didapatkan tersebut akan dianalisa oleh penulis dan penelitian ini mampu mendapat hasil dan menjawab rumusan

masalah. Tahap yang terakhir adalah penulis memaparkan hasil penelitian untuk diuji.

1.9 Sistematika Pembahasan

Demi menjadi pembahasan yang sistematis, penulis menyusun sistematika pembahasan sehingga didapatkan hasil penelitian yang baik dan dapat dipahami dengan mudah. Penulis menyusun dan mendeskripsikan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Merupakan bagian pembahasan yang di dalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, dan metode penelitian yang terbagi menjadi jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan terakhir proses pengumpulan data.

BAB 2 Membahas tentang dinamika kasus *women trafficking* di India dan minimnya penanganan dari kebijakan pemerintah.

BAB 3 Menganalisis menggunakan ketiga aspek variabel dari teori feminisme dalam Hubungan Internasional yaitu empiris, analitis, dan normatif.

BAB 4 Berisi kesimpulan yang mencakup inti dari analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis serta rekomendasi yang terhadap permasalahan pada penelitian.

BAB 2

KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN *WOMEN TRAFFICKING* DI INDIA PADA TAHUN 2018-2023

Dalam bab ini penulis akan menjadi tiga subbab. Subbab pertama akan membahas mengenai dinamika kasus *women trafficking* di India pada tahun 2018-2023. Kemudian di sub bab kedua menjelaskan mengenai penyebab terjadinya kasus *women trafficking*. Serta sub bab ketiga menjelaskan mengenai minimnya kebijakan pro perempuan dalam menanggulangi *women trafficking*.

2.1. Dinamika *Women trafficking* di India

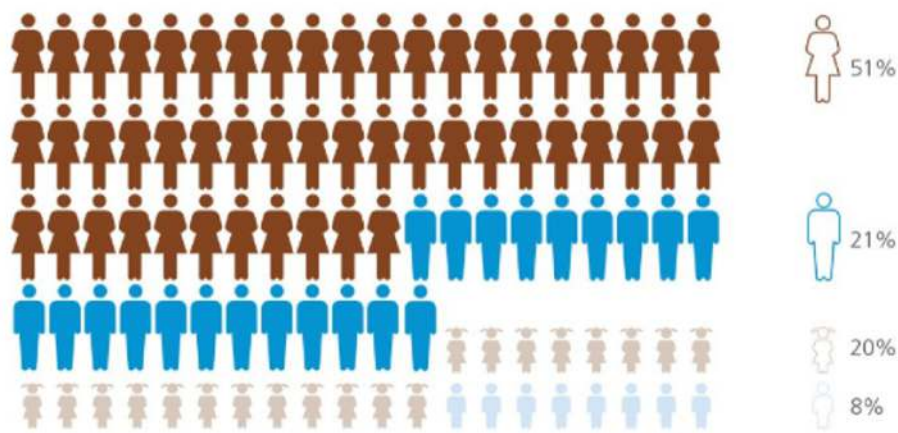
India merupakan salah satu dari negara yang paling cepat berkembang di dunia (Jorgenson, 2016). Populasi India pada dari 1950 sampai dengan 2023 menunjukkan kecenderungan yang meningkat, walaupun pertumbuhan pendudukan mulai melandai. Sampai dengan November 2023, populasi India mencapai 1.411.655.101 orang dengan dominasi laki-laki sebesar 744.364.592 atau 51,6% dan jumlah penduduk perempuan adalah sebesar 697.290.509 atau 48,4% (Countrymeters, 2023).

Menurut survei yang dilakukan oleh *Thomson Reuters Foundation*, India menjadi negara paling berbahaya bagi wanita di dunia pada tahun 2018. India sebagai negara paling berbahaya bagi wanita setelah sebelumnya berada di urutan keempat pada tahun 2012 setelah Afghanistan, Democratic Republic of Congo (DRC), dan Pakistan. Survei ini diambil berdasarkan tingkat kekerasan seksual, pelecehan terhadap perempuan, praktik budaya dan tradisi serta perdagangan

manusia termasuk kerja paksa, perbudakan seks dan perbudakan rumah tangga (Goldsmith and Beresford, 2018).

Salah satu isu sosial yang sejak lama terjadi di India adalah perlakuan diskriminatif terhadap perempuan. Kondisi ini menyebabkan terjadi banyak kasus perdagangan manusia ke negara-negara tetangga maupun di dalam negeri India sendiri. Perempuan merupakan objek utama dari para *traffickers* dalam kegiatan perdagangan manusia tersebut. Konstitusi India menjamin persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang gender, tetapi hal ini belum dapat disadari oleh seluruh masyarakat dan tidak dapat mengakhiri diskriminasi gender (Daniran, 2021). Berikut akan penulis tampilkan data kasus korban perdagangan manusia yang kebanyakan perempuan.

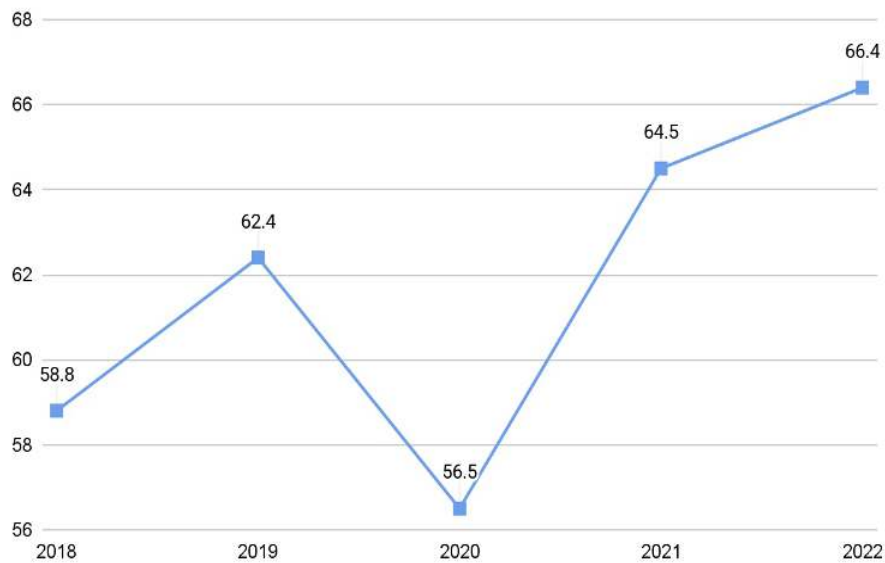
Grafik 1 Korban Perdagangan Manusia Mayoritas Perempuan di India



Sumber: (UN, 2016)

Grafik 1 menunjukkan menurut National Crime Records Bureau (NCRB) India, lebih dari 6.500 korban perdagangan manusia terutama perempuan telah diidentifikasi di negara tersebut pada tahun 2018-2022 yang 60% diantaranya adalah perempuan dan anak perempuan. Para ahli yakin sebenarnya jumlah jauh lebih tinggi karena kurangnya pelaporan yang belum banyak terdata serta secara rinci. Di Asia Selatan, UNODC (United Nation Office on Drugs and Crime) adalah salah satu unit Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Narkoba dan Kejahatan, mereka menjelaskan bahwa India, Bangladesh, Nepal, dan Pakistan merupakan asal negara dengan jumlah *women trafficking* tertinggi. Tidak hanya itu, India dan Pakistan menjadi negara dengan urutan tertinggi pemasok *women trafficking* yang berasal dari kawasan Asia Selatan. Sebanyak 150.000 perempuan diperdagangkan ilegal melalui jaringan-jaringan kejahatan internasional. Data yang diterbitkan oleh Pemerintah India melalui National Crime Records Bureau (NCRB) pada tahun 2018 hingga 2022 mengungkapkan bahwa angka kejahatan dalam kaitannya dengan *women trafficking* meningkat signifikan (Aziz, 2023).

Grafik 2. Kekerasan terhadap Perempuan India 2018-2022



Sumber: (Bushra Ansari and Sowmya Rajaram, 2024)

Dari grafik tersebut dapat disimpulkan oleh penulis adanya pola yang sama terhadap peningkatan kasus perdagangan di India yaitu meningkat pada tahun 2018 dan 2019, lalu pada 2020 terjadi penurunan. Faktor terbesar yang mendorong perdagangan ini yaitu kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi serta faktor ekonomi ini diperburuk oleh adanya COVID-19 yang juga menurunkan angka kejahatan data yang telah dipaparkan oleh NCRB di atas. Di India COVID-19 dikonfirmasi melalui kasus pertamanya pada 30 Januari 2020, adanya pandemi secara tidak langsung menurunkan angka kasus dari perdagangan yang ada di India. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa faktor seperti adanya pembatasan pergerakan, perekonomian menurun yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat, peningkatan dalam pemantauan hukum. (Ansari and Rajaram, 2024)

Statista juga merupakan sumber lainnya yang dikaji oleh penulis yang memaparkan peningkatan perdagangan perempuan dan anak-anak pada tahun 2018 hingga 2019. Pada tahun 2018 ada 38.46 persen perempuan dan anak-anak yang terlibat dan terus meningkat 40.22 persen pada tahun 2019. Tingginya jumlah kasus perdagangan pada tahun 2018 didukung oleh studi dari Thomson Reuters Foundation yang ditulis oleh Niall McCarthy yang pada 2018 menobatkan India sebagai negara paling berbahaya nomor satu di dunia bagi perempuan. (McCarthy, 2018)

Setelah menghadapi Pra Covid-19 penulis memberikan gambaran bagaimana pandemi dapat berkontribusi secara tidak langsung terhadap penurunan dari angka kasus *women trafficking*. Pada bab ini, penulis melanjutkan penelitian pada tahun 2020 hingga 2022 dimana pandemi masih berlanjut. Data perdagangan perempuan dan anak-anak yang ada di setiap negara, termasuk India merupakan publikasi secara resmi. Estimasi tentang skala perdagangan manusia, termasuk perempuan dan anak-anak dalam banyak kasus, polisi tidak mendaftarkan kasus-kasus di bawah hukum dari perdagangan manusia. Banyak dari kasus mungkin tidak dapat terdeteksi karena penjahat beroperasi secara *online* dan menggunakan situs jejaring sosial. Oleh karena itu, masih belum ada data yang dapat diandalkan tentang jumlah kasus dari *women trafficking* di India (Asnur, 2023)

Dampak pandemi pada perdagangan seks menjadikan perempuan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai karena adanya pembatasan sosial, dan meningkatkan resiko perbudakan yang rentan. Prof Dr Siddharta Sarkar dalam risetnya pada tahun 2020 yang berjudul *sex trafficking in India: The*

Politics and effects of COVID-19 Pandemi menjelaskan bahwa para korban berangkat ke Benggala Barat dan wilayah Timur Laut India melintasi perbatasan India-Bangladesh. Dari setiap sepuluh migrasi anak ilegal, enam kasus ditemukan sebagai imigrasi paksa (korban perdagangan). Perdagangan seks membawa resiko dari penyebaran COVID-19 ke ribuan orang, Karena situasi *lockdown* akibat adanya pandemi, kelangsungan hidup para korban menjadi semakin memprihatinkan. Di sisi lain, para penjahat dari perdagangan menggunakan metode operasi baru dengan memanfaatkan teknologi. Hal tersebut seperti situs iklan terbuka dan tertutup, web dewasa, platform media sosial, ruang obrolan yang semakin meluas ke dark web (Sarkar, 2020).

Pada tahun 2021 *Statistic Research Department* memaparkan jumlah kasus perdagangan manusia yang dilaporkan ke India. Pada tahun 2021, berdasarkan negara bagian, lebih dari 1000 kasus perdagangan manusia dilaporkan dengan hampir 3000 korban di seluruh India. Negara bagian Maharashtra memiliki jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi yaitu dengan lebih dari 260 kasus. Urutan selanjutnya diikuti oleh Assa, Odisha, Telangana, Jharkhand, Delhi, dan Kerala. Data ini dirilis pada agustus 2022 per periode survei 2021. Sedangkan Chandigarh Meghalaya, Tripura, Arunachal Pradesh, Manipur, Jammu & Kashmir hanya memiliki satu kasus perdagangan manusia (Statistic, 2022)

Data yang ditulis oleh *Trafficking in Persons Report* pada tahun 2022 menjelaskan bahwa korban perdagangan manusia 41 persennya yaitu anak-anak dan 59 persennya yaitu perempuan. Volume *women trafficking* di India 2018 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi pada kurun waktu tersebut. Alasan perdagangan tersebut antara lain dilakukannya kerja paksa, eksploitasi

seksual, domestik penghambatan, kawin paksa, mengemis, pengambilan organ tubuh, pornografi anak, dan lain-lain (Statista, 2022).

Pemerintah mempertahankan upaya perlindungan secara keseluruhan, meskipun identifikasi korban menurun dan layanan untuk korban tetap tidak memadai. Pemerintah pusat mengandalkan negara bagian untuk memberikan bantuan kepada korban *women trafficking*. Pemerintah pusat dan negara bagian menawarkan tempat penampungan dan layanan bagi perempuan dewasa yang menjadi korban perdagangan manusia (Bhattacharya, 2023).

Tingginya kasus *women trafficking* ini sangat meresahkan terbukti dengan tingginya angka jumlah *women trafficking* setiap tahunnya yang mana melibatkan pemaksaan penipuan atau penculikan khususnya perempuan untuk digunakan dengan tujuan eksploitatif, *women trafficking* biasanya juga tidak segan menggunakan ancaman kekerasan serta manipulasi yang mana untuk mengendalikan para korban dan hal itu masih menjadi permasalahan India sampai saat ini (Social Justice, 2023).

Kejahatan terhadap perempuan merupakan kejahatan paling umum keempat terhadap perempuan di India. laporan tahunan Catatan Kejahatan Nasional tahun 2023, tercatat 31.677 kasus pemerkosaan di negara tersebut, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang terdapat 28.811 kasus. Data total 31.677 kasus pemerkosaan, dari kasus tersebut banyak dilakukan oleh orang yang dikenal korban (NCRB, 2023).

India digambarkan sebagai salah satu negara dengan tingkat pemerkosaan perkapita tertinggi. Pemerintah juga mengklasifikasi seks dalam janji pernikahan palsu sebagai pemerkosaan. Setelah beberapa insiden mendapat perhatian media dan memicu protes masyarakat lokal dan juga internasional. Menurut statistik NCRB 2021, Rajasthan memiliki jumlah pemerkosaan tertinggi di antara bagian, diikuti oleh Madhya Pradesh dan Uttar Pradesh. Di antara kota-kota metropolitan, ibu kota negara Delhi terus memiliki tingkat pemerkosaan tertinggi kasus pada tahun 2021 sampai 2023, sementara Jaipur memiliki tingkat pemerkosaan tertinggi. Kolkata memiliki kasus pemerkosaan memiliki kasus pemerkosaan paling sedikit yang terdaftar di antara kota-kota metropolitan dengan tingkat pemerkosaan terendah (NCRB, 2022).

India dinilai rentan terhadap adanya kekerasan seksual yang meliputi beberapa indikator yaitu kasus pemerkosaan, kerja paksa, pernikahan paksa, dan perbudakan seksual. Perempuan lebih rentan terhadap eksploitasi seksual dan kerja domestik paksa sebagai bentuk *trafficking* yang paling umum di India. Patriarki yang banyak di wilayah India menempatkan perempuan dalam posisi subordinat (bergantung, tidak punya kuasa atas pilihan hidup). Perempuan lebih mungkin tidak disekolahkan, dinikahkan dini, atau dianggap beban ekonomi keluarga, sehingga lebih mudah dimanipulasi oleh pelaku *trafficking*. Perempuan dari keluarga miskin sering terpaksa migrasi kerja misalnya ke kota besar atau ke luar negeri yang membuka peluang bagi perekrut *trafficking*, serta keterbatasan akses pendidikan, pekerjaan dan perlindungan hukum membuat perempuan

semakin rentan. Faktor gender membuat perempuan lebih mudah dieksploitasi secara seksual (permintaan pasar gelap), lebih rentan dikontrol secara sosial (tidak bisa melawan, tidak tahu haknya), lebih sering dibujuk dengan janji kerja rumah tangga, pernikahan, atau modeling (McCarthy, 2018).

Perdagangan perempuan India ke luar negeri terjadi terutama dalam konteks eksploitasi seksual dan kerja paksa. Perempuan India diperdagangkan ke berbagai negara, terutama Timur Tengah (negara-negara GCC seperti Arab Saudi, Lebanon dan Yordania), serta ke negara-negara seperti Bangladesh, Ethiopia, Nepal, Sri Lanka, dan sejumlah kecil dari Benin, Guinea, dan Filipina. Kasus perdagangan perempuan India ke Eropa juga tercatat, khususnya perempuan dari Punjab yang dijanjikan visa kerja legal ke negara-negara seperti Italia dan Jerman, tetapi malah dijebak oleh sindikat dari *women trafficking* yang menangkap dan mengeksploitasi mereka di negara transit seperti Serbia. Setiap migran India yang bermigrasi dengan sukarela ke Timur Tengah dan Eropa untuk bekerja setiap tahunnya sebagai pembantu rumah tangga dan butuh berketerampilan rendah dan sebagian dari mereka juga menjadi bagian dari industri *women trafficking*. Dalam survei terbaru di India, perempuan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial dengan berbagai macam alasan. Dalam urutan kepentingannya, hal-hal tersebut adalah kemiskinan dan pengangguran serta kurangnya layanan reintegrasi yang tepat, kurangnya pilihan, stigma dan merugikan sikap sosial (Iyer and Radha, 2016).

Pada tahun 2020 seorang korban bernama Pooja (samaran) diculik oleh penyelundup anak ketika India mulai keluar dari lockdown nasional karena pandemi. Pooja dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga selama satu tahun.

Ia diselamatkan oleh tim yang dibentuk oleh Departemen Sumber Daya Tenaga Kerja Bihar, sebuah LSM yang bekerja untuk pemberdayaan perempuan, pemuda dan anak-anak. Pooja menceritakan bahwa ia disiksa oleh majikannya, yang biasa memukulnya hingga tidak kali sehari dengan alasan apapun. Dia memiliki lebam di tubuhnya ketika diselamatkan oleh LSM pada 4 Juni 2021 (Ghosh, 2021).

India merupakan negara asal, transit dan tujuan bagi perempuan untuk diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual. Perdagangan antar negara bagian mewakili 89% perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual di India merupakan negara asal utama, transit serta juga tujuan. Negara bagian pemasok terbesar yaitu; Andhra Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, Benggala Barat, Karnataka, Tamil Nadu, Maharashtra dan Uttar Pradesh. Kota-kota seperti Mumbai, Delhi, Kolkata, Bangalore, dan Hyderabad memiliki konsentrasi pelacur tertinggi (Ollus and Nevala, 2001).

Broker atau penyalur pekerja seks biasanya merupakan anggota masyarakat yang dikenal oleh korban atau keluarga korban yang mengaku membantu keluarga tersebut, petugas mencari bantuan dari masyarakat setempat untuk keluarga dan juga korban individu yang siap menculik calon korban dan anggota anggota keluarga. Istrinya dilacurkan langsung oleh suaminya serta ditelantarkan atau diceraikan, dijual kepada calo yang akan menjualnya lagi. Praktek ini telah didokumentasikan di Bihar, Bengal, Chhattisgarh, Orissa, Uttaranchal dan Hyderabad (Sahni, Shankar, and Apte, 2008).

Women trafficking penyebab kesengsaraan yang tidak terhingga karena melanggar hak asasi manusia. Hak dan martabat individu dalam beberapa cara. *Women trafficking* melanggar hak individu untuk hidup, bermartabat, keamanan,

privasi, kesehatan, pendidikan dan penyelesaian keluhan. Perdagangan dengan tujuan seksual komersial, eksploitasi dan eksploitasi berbasis non-seks juga merupakan tantangan transnasional dan kompleks serta merupakan kegiatan kriminal terorganisir, suatu bentuk pelanggaran dari hak asasi manusia yang ekstrim dan merupakan isu pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial.

2.2 Kekerasan terhadap Perempuan di India

Isu kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang krusial di India. Dalam kurun waktu antara tahun 2018-2023 tercatat bahwa tingkat kekerasan terhadap perempuan mengalami naik serta sedikit penurunan. Bahkan sebuah studi internasional yang dilakukan *Thomson Reuters* menyatakan bahwa India menjadi negara paling berbahaya bagi perempuan di dunia tahun 2018.

Women trafficking dan prostitusi paksa adalah masalah serius yang lazim terjadi di India. Sebagian besar masalah perdagangan di India adalah masalah internal dan korbannya berasal dari strata sosial yang kurang beruntung secara ekonomi, suku Dalit dari kasta rendah, minoritas agama dan anggota dari komunitas suku yang paling rentan. Para korban umumnya terpicat pada gaya hidup dan kesempatan kerja yang baik, namun akhirnya di jual oleh agen sebagai budak seks (Suwarno, 2020).

Women trafficking dianggap sebagai kejahatan terorganisir terbesar ketiga secara global dan jumlahnya meningkat setiap tahun. Kemiskinan, pekerjaan yang tidak merata, diskriminasi gender, praktik-praktik tradisional dan budaya berbahaya serta kurangnya implementasi kebijakan yang tepat untuk mengakhiri kondisi yang parah ini adalah beberapa penyebab perdagangan manusia di India.

Hampir 80% dari *women trafficking* di seluruh dunia adalah untuk eksploitasi seksual, dengan sekitar 1,2 juta perempuan dibeli dan dijual sebagai budak seksual setiap tahun. India sebagai negara yang masih menjadi negara penerima, pengirim dan transit oleh para *women trafficking*. Perempuan dan anak perempuan adalah korban utama dari *women trafficking* di India (Suwarno, 2020).

Para korban ini kemudian dipaksa menjadi pelacur, kawin paksa, dan kerja rumah tangga. Berdasarkan sebuah laporan yang diterbitkan oleh pemerintah India ada sekitar 10 juta pekerja seks di India yang berasal dari Mumbai 1.000.00 yang mana merupakan pusat industri seks terbesar di Asia. Sekitar 300.000 sampai 500.000 anak-anak di bawah usia 18 tahun juga terlibat dalam perdagangan seks. Angka tersebut merupakan tingkat perdagangan yang terjadi di berbagai negara bagian di India, bukan perdagangan internasional (US Department of State, 2018).

Selain perdagangan untuk pelacuran, anak-anak dan perempuan juga dibeli dan dijual untuk pernikahan paksa di daerah-daerah yang mengalami defisit pada anak perempuan akibat pembunuhan bayi perempuan. Dalam kasus lain, anak-anak dijual dan dipaksa untuk mengandung dan melahirkan bayi. Uang yang dihasilkan dari kerja paksa tersebut digunakan untuk biaya pendidikan atau sebagai modal untuk mahar pernikahan (Fiinnovation, 2018)

Rata-rata korban penculikan dan prostitusi paksa menjadi sasaran pelecehan fisik dan seksual serta diperlakukan sebagai budak. Dalam banyak kasus, anak-anak perempuan yang diperdagangkan memiliki risiko segala macam penyakit, mulai dari kehamilan yang tidak diinginkan, HIV/AIDS, kanker serviks, cedera fisik parah, kekerasan, penyalahgunaan obat-obatan dan banyak lagi,

belum lagi trauma emosional dan psikologis jangka panjang yang akan mereka hadapi nantinya (US Department of State, 2018).

Meskipun kasus *women trafficking* terus melunjak di India, ironisnya banyak petugas penegak hukum yang korup untuk melindungi pelaku perdagangan manusia dan pemilik rumah pelacuran dari upaya penegakan hukum. Para petugas menerima suap dari perusahaan perdagangan seks, mendapat layanan seksual dari para korban dan mendapat *tips* dari para pelaku perdagangan seks untuk menghalangi upaya penyelamatan korban (Fiinnovation, 2018).

Di India, banyak aktivis dan juga organisasi yang telah bekerja keras untuk melawan perbudakan modern dan perdagangan manusia, termasuk *women trafficking*. Berikut adalah beberapa aktivis dan juga organisasi yang ikut menyuarakan anti *women trafficking* di India. Aktivis pertama yang paling terkenal dalam perjuangannya melawan perdagangan manusia di India yaitu Ruchira Gupta, yang merupakan pendiri dari *Apne Aap Women's Collective*. Sebuah organisasi yang berka dengan perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia dan juga prostitusi paksa di India. Gupta juga dikenal di dunia internasional dan sering berbicara di berbagai forum internasional mengenai isu perdagangan manusia, termasuk di PBB (Firmaliza, 2014).

Maneka Gandhi juga merupakan seorang politikus dan aktivis sosial yang terkenal dengan keterlibatannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan juga perlindungan anak-anak. Gandhi merupakan menteri pengembangan perempuan dan anak-anak India pada tahun 2014-2019, ia berperan dalam pengesahan beberapa kebijakan yang memiliki tujuan untuk memberantas perdagangan manusia, seperti *The Trafficking of Persons (Prevention, Protection,*

and Rehabilitation) Bill pada tahun 2018 yang tujuannya yaitu untuk menyediakan perlindungan lebih baik lagi bagi korban *women trafficking* di India (PRS India, 2018).

Aktivis dan organisasi memiliki peran penting dalam memerangi *women trafficking* di India, dengan berbagai cara mulai dari dukungan untuk kebijakan pemerintah, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta bantuan secara langsung kepada korban. Selain itu, peran dalam advokasi global dengan memastikan bahwa perdagangan manusia tetap menjadi prioritas utama dalam agenda hak asasi manusia internasional. Tidak hanya dengan berfokus pada penanggulangan manusia, namun juga memberikan perhatian lebih pada pemulihan korban dan advokasi untuk perubahan kebijakan dan penegakan hukum yang lebih kuat. Upaya kolektif ini membantu memperkuat sistem yang lebih baik dalam mengidentifikasi, menyelamatkan dan memberikan perlindungan kepada korban, serta mendorong perubahan sistemik yang dapat mencegah *women trafficking* lebih lanjut.

2.3 Minimnya Upaya Pemerintah India dalam Menanggulangi *Women Trafficking*

Kasus *women trafficking* di India menjadi perhatian serius di negaranya. India tidak hanya tinggal diam dalam mengatasi isu ini. Meski dihadapkan dengan permasalahan yang cukup kompleks, India melakukan beberapa usaha untuk menangani tingginya kasus *women trafficking*. Selama periode 2018-2023, India lebih banyak sumber daya untuk memerangi *women trafficking*, melalui revisi kebijakan dan pengesahan undang-undang baru.

Untuk mengatasi hal tersebut India mengajukan undang-undang untuk mengatasi *women trafficking* yaitu *The Trafficking of Persons (Prevention, Protection, and Rehabilitation) Bill* pada tahun 2018 diperkenalkan di Lok Sabha oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Ibu Maneka Gandhi pada tanggal 18 Juli 2018 dan disahkan di DPR pada tanggal 26 Juli 2018. RUU ini merupakan sebuah undang-undang yang diajukan India untuk mengatasi masalah *women trafficking*, yang sering kali mencakup eksploitasi seksual dan kerja paksa, serta memastikan perlindungan serta pemulihan bagi korban. RUU memiliki tujuan untuk memperkuat upaya pemerintah India dalam memerangi *women trafficking* dan menyediakan kerangka hukum yang lebih komprehensif bagi pencegahan, perlindungan korban, dan rehabilitasi (PRS Legislative Research, 2024).

The Trafficking of Persons Bill adalah langkah penting dalam menanggulangi *women trafficking* di India. Meskipun ada beberapa kekhawatiran terkait implementasi dan pemenuhan infrastruktur yang diperlukan, RUU ini tetap merupakan langkah maju dalam memberikan perhatian kepada korban *women trafficking* dan memperkenalkan mekanisme pencegahan yang lebih baik. Dengan memberikan perhatian lebih pada pencegahan, perlindungan korban, dan pemidanaan yang tegas terhadap pelaku. India memperkuat upayanya dalam memerangi *women trafficking* (PRS Legislative Research, 2024).

Salah satu implementasi dari *The trafficking of persons bill* adalah pembentukan *Anti Human Trafficking Unit* (AHTU) yang dibentuk secara khusus untuk mengatasi isu *women trafficking* di India. AHTU beranggotakan petugas kejaksaan dan kepolisian, unit-unit ini dibentuk di tingkat distrik dan perbatasan

untuk meningkatkan penegakan hukum dan koordinasi antar lembaga. AHTU memiliki prosedur tersendiri pada saat menangani kasus *women trafficking*, yang dianggap lebih efektif dibandingkan dengan kepolisian lokal (Todd, 2005).

AHTU telah melakukan upaya yang signifikan dalam menangani *women trafficking* di India, berbagai operasi berhasil menyelamatkan ribuan korban *women trafficking*. AHTU bekerja sama dengan LSM dan organisasi masyarakat untuk mengidentifikasi dan membantu para korban. AHTU telah melatih lebih dari 13.670 personel penegak hukum dan untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menyelidiki dan mengadili kasus *women trafficking* secara efektif. Pelatihan ini telah meningkatkan respon menyeluruh terhadap insiden *women trafficking*. Namun, efektivitas secara keseluruhan terhambat oleh berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, hambatan komunikasi dan berbagai masalah yang terkait dengan kewenangan dalam struktur penegakan hukum (Todd, 2005).

Antara tahun 2018 sampai dengan 2023, India telah memperkuat kerja sama internasional dalam menanggulangi *women trafficking*, seperti kerja sama bilateral India dan Myanmar pada november tahun 2019. India dan Myanmar menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat kerja sama dalam pencegahan *women trafficking*. Hal ini mencakup pembentukan tim gabungan dan kelompok kerja untuk deteksi dan pencegahan perdagangan manusia, pembuatan basis data bersama mengenai pelaku dan korban perdagangan manusia untuk pertukaran informasi yang aman, serta peningkatan kapasitas program pelatihan bagi lembaga terkait kedua negara (Ministry of External Affairs, Government of India, 2019).

Pemerintah India menandatangani nota kesepahaman dengan Uni Emirat Arab (UAE) pada tahun 2020 dengan tujuan untuk pencegahan dan penanggulangan *women trafficking*, pembentukan sel anti perdagangan dan tim gabungan untuk mencegah *women trafficking*, serta kerja sama penegakan hukum termasuk pertukaran informasi untuk mengintersepsi pelaku perdagangan (PMINDIA, 2016).

Dalam konteks regional, India juga meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Asia Selatan seperti sri lanka. Dengan menyepakati peningkatan kerja sama dalam keamanan dan pertahanan seperti fokus pada pemberantasan perdagangan narkoba dan manusia, pelatihan personal keamanan untuk meningkatkan penanganan isu perdagangan manusia yang lebih sensitif terhadap gender (Panda, 2019).

Pemerintah juga bekerja sama dengan organisasi Internasional seperti UN Women untuk mencapai kesetaraan gender. Program programnya berfokus pada penguatan pemberdayaan ekonomi perempuan, perencanaan dan penganggaran nasional yang responsif gender, serta mengadvokasi partisipasi perempuan yang lebih besar dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan di semua sektor (UN Women, 2021).

UN Women memiliki program yang bernama *Annual Report* yang berperan untuk memberikan laporan mengenai *women trafficking* dalam rentan waktu 2018 sampai dengan 2020. UN Women bekerja sama dengan pemerintah India dalam melaksanakan pelaporan ini sebagai upaya untuk dapat meningkatkan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia yang terjadi. Pada tahun 2018, terdapat program yang bernama UN Women's Second Chance Education

Programme. Program tersebut merupakan suatu agenda yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendidikan perempuan India yang tidak dapat menyelesaikan pendidikannya agar dapat kembali memasuki pendidikan normal (Luciana, 2023).

Upaya UN Women dalam mengatasi *women trafficking* di India telah memberikan dampak yang positif dalam mengurangi jumlah perempuan yang diperdagangkan dan menghilangkan diskriminasi yang diakibatkannya. Dalam kurun waktu 2018 sampai 2022, UN Women berupaya memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan, mendapatkan manfaat dari kesetaraan gender dalam sistem pemerintahan dan hidup dalam segala bentuk kekerasan. Dimana perempuan harus mendapatkan manfaat dari adanya penerapan kebijakan yang ada dan kebijakan yang mendorong kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan (Luciana, 2023).

NCRB mengungkapkan bahwa tingkat kejahatan terhadap perempuan di India meningkat sebesar 12,9% antara tahun 2018 dan 2022. Peningkatan ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk peningkatan kejahatan aktual, peningkatan mekanisme pelaporan, dan meningkatnya keinginan perempuan untuk bicara tentang pengalaman kekerasan yang mereka alami. Meskipun era modern yang sudah terjadi di dunia ini, dimana dapat menjadi faktor pendukung untuk menghentikan *women trafficking* yang melanda India sejak lama. Dengan adanya teknologi serta pemerintahan yang berubah, seharusnya menjadi salah satu faktor yang dapat merubah dari stigma maskulinitas yang bahwasanya hal tersebut tidak diperlukan lagi, karena perempuan di berbagai dunia telah menunjukkan kualitas mereka sebagai perempuan, untuk membantu perekonomian keluarga dan juga memiliki peran penting bagi negara.

Karena tidak semua perempuan hanya bertugas sebagai alat untuk melahirkan dan juga mengurus rumah tangga, perempuan juga memiliki keahlian dibidang masing-masing, sehingga perlunya penggunaan teknologi untuk mencari sudut pandang baru di negara-negara lain untuk dapat membandingkan antara apa yang dilakukan oleh laki-laki di India terhadap perempuan di negara mereka, dan juga apa yang dilakukan perempuan di negara lainnya dimana dapat membanggakan negara mereka dengan hasil maupun usaha mereka sebagai perempuan. Sangat banyak aktivis-aktivis mengenai *women trafficking* yang terbunuh di India, karena laki-laki yang sebagai pihak kontra tersebut tahu, bahwasanya aktivis tersebut memiliki power yang sangat besar dalam mengumpulkan massa untuk melawan sistem patriarki dan *women trafficking*. Sehingga aktor dari aktivis tersebut banyak yang meninggal dengan tragis, seperti ditembak, dan bahkan aktor aktivis tersebut diculik lalu di mutilasi

women trafficking mengembalikan adanya stigma dari kejamnya peran laki-laki dalam generasi kekerasan. Perspektif gender ini, tentunya ditempatkan di wilayah yang memiliki banyak kekerasan, dalam hal ini maskulinitas merupakan pondasi alami yang sudah lama terjadi, sehingga politisi di India harus memikirkan agar kekuatan sosial maskulinitas yang telah memunculkan banyak gerakan-gerakan gender yang menginginkan adanya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan.

BAB 3

ANALISIS KASUS *WOMEN TRAFFICKING* DI INDIA MENGGUNAKAN KETIGA ASPEK FEMINISME EMPIRIS, ANALITIS, DAN NORMATIF

Pada bab 3 ini penulis akan membagi menjadi tiga sub-bab. Sub-bab pertama membahas tentang analisis variabel feminisme empiris dengan kasus *women trafficking* yang dimana variabel ini membahas tentang penyebab bisa terjadinya *women trafficking*, serta cara pandang laki-laki dalam melihat perempuan sangatlah buruk. Sub-bab kedua akan membahas variabel feminisme analitis, dalam hal ini penulis menganalisis bagaimana kasus *women trafficking* dikaitkan dengan ketidak setaraan gender. Dalam variabel analitis, menjelaskan bahwasanya hegemoni dan kekuasaan laki-laki sangat sulit untuk menyetarakan antara gender di segala aspek kehidupan, sehingga terjadinya *women trafficking* merupakan bagian dari kekuasaan laki-laki. Sub-bab ketiga akan membahas variabel feminisme normatif, dalam hal ini minimnya kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kesetaraan gender di India, agar mengubah sudut pandang dari hegemoni dan stigma pada laki-laki di India dapat berubah dengan adanya kebijakan kesetaraan gender.

3.1. Analisis Feminisme Empiris dalam menjelaskan Dinamika *Women Trafficking* di India

Feminisme empiris yaitu cara pandang seseorang dalam melihat gender, yang di mana maskulin salah satu contoh yang memiliki dominan lebih dibandingkan perempuan, dan juga memiliki peran yang sangat penting untuk

dapat menjelaskan realitas politik dunia global. Feminisme empiris berperan dalam mengoreksi adanya representasi yang sangat berbeda dibandingkan laki-laki, sebagai contoh yaitu di dalam dunia politik baik negara maupun organisasi internasional yang mayoritas diduduki oleh laki-laki, dengan adanya sebuah asumsi yang mengatakan laki-laki lebih dapat diperhitungkan dibanding perempuan (True 2005, 216).

Di ranah kebijakan, para analisis feminis mengungkapkan laki-laki merupakan aktor rasional yang dominan dari segala seluruh pembuatan kebijakan untuk seluruh keputusan nasional dan juga atas dasar kepentingan nasional. Sehingga pada tahun 1990, Amnesty Internasional mengakui hak asasi perempuan dengan menambahkan gender ke dalam politik (True 2005, 220).

Feminisme empiris apabila dikaitkan dengan apa yang sudah dibahas dalam bab sebelumnya, maka memiliki fokus untuk mengkaji pandangan yang berusaha untuk mempresentasikan peran perempuan, dari stigma yang salah oleh laki-laki. Laki-laki dianggap selalu menjadi pembeda dan juga selalu diperhitungkan, karena dengan maskulinitas dan dianggap lebih bisa melakukan semua tugas yang ada dibandingkan perempuan, baik dari kekuatan, pengalaman. Sedangkan berbeda dengan perempuan dianggap tidak dapat melakukan sesuatu hal layaknya yang dapat dilakukan oleh laki-laki (Internasional, 2021).

Laki-laki di India dianggap sebagai tingkat tertinggi dalam hal gender di India. Seperti yang sudah di bahas dalam bab sebelumnya, bahwasanya superior dari laki-laki yang sudah lama menduduki sejak lama. Kasus *women trafficking* di India merupakan bentuk nyata dari bentuk diskriminasi serta pembunuhan

terhadap perempuan. Grafik 2 menunjukkan tingkat *women trafficking* yang terjadi pada tahun 2018 hingga 2022.

Variabel feminisme empiris menjelaskan stigma dan hegemoni laki-laki yang dapat menyebabkan terjadinya *women trafficking*. Tentunya karena kurangnya pemahaman, dan juga mayoritas laki-laki masih berpikir bahwasannya perempuan di India tidak terlalu penting dan berguna. Tentunya kasus-kasus yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang terjadi di India, seperti *women trafficking*, diskriminasi perempuan, dan gerakan gender, hal ini disebabkan oleh hegemoni laki-laki yang semestinya perempuan memiliki peran yang penting untuk dapat membantu laki-laki, namun tidak diberikan kesempatan (True 2005, 221).

Upaya demi upaya yang dilakukan oleh pemerintah India untuk menangani *women trafficking*, dapat dikatakan gagal. Melihat grafik 2 peningkatan *women trafficking* beranjak naik dari tahun 2018 hingga tahun 2023, yang pada awalnya masih memiliki penurunan yang signifikan. Sehingga menjadi sebuah perdebatan dan ancaman bagi perempuan, bahwasanya perspektif gender yang diterapkan merupakan langkah yang bagus untuk India atau tidak. Dengan cara menggunakan perspektif gender di semua instansi swasta dan negara, serta lembaga negara belum dapat dikatakan efektif apabila, masyarakat terutama laki-laki masih belum bisa sadar akan pentingnya kesetaraan gender. Faktanya pemerintah sudah memberikan upaya untuk dapat mengurangi angka *women trafficking* di India, namun dapat dilihat di grafik 2 kalau penurunan dan peningkatan *women trafficking* secara drastis dapat terjadi.

Karena pemerintah India sangat mendukung anti *women trafficking* dan kesetaraan gender yang ingin diperlakukan, membuat para maskulin merasa akan tersingkirkan dengan adanya perempuan. Sangat banyak gerakan-gerakan gender seperti gerakan melawan *women trafficking* yang menjadi gerakan kesetaraan gender dan anti *women trafficking*. Namun jika dilihat variabel feminisme empiris, gerakan di atas merupakan ancaman bagi laki-laki. Karena mengancam hegemoni mereka; kekuasaan, pekerjaan dan superioritas (True 2005,217). Wanita sangat beresiko dalam kekerasan berbasis gender, hal ini juga menunjukkan kegagalan pemerintah dalam keseriusan menangani kasus ini, dengan bukti karena peningkatan *women trafficking* terus terjadi. Mereka yang menunjukkan adanya kemajuan dan peluang untuk mendukung segala upaya pemerintah yang dilakukan dalam mencegah, menangani, serta menghukum dari tindak pelaku *women trafficking* ini.

3.2 Analisis Feminisme Analitis dalam Menjelaskan Kekerasan pada Perempuan di India

Feminisme analitis menata ulang sebuah kerangka feminis tentang gender yang menuju pada konstruksi sosial dari laki-laki dan perempuan yang telah dibangun lama secara sosial. Misalnya, militer membentuk identitas gender maskulin, karena mayoritas militer adalah laki-laki, dan juga peran militer adalah melindungi wanita dan anak-anak. Asumsi Identitas gender merupakan suatu sifat manusia, dan tidak secara resmi ada di konstitusi. Namun apabila asumsi mengenai gender ini telah diterapkan dalam dunia politik dan sebagainya, maka

akan memiliki efek politik dan membentuk sebuah kekuasaan di kemudian hari (True 2005, 222).

Karena cara pandang mengenai hegemoni laki-laki sudah terbentuk secara lama, menyebabkan konteks sosial dan politik dari hegemoni laki-laki sudah dilembagakan. Tentunya dengan adanya cara pandang kekuasaan oleh laki-laki, tidak mudah dipisahkan dari pembagian gender yang terjadi di ruang publik, karena dominasi laki-laki sudah membuat stigma mengenai perempuan sangat berbeda. Variabel feminisme analitis menjelaskan hegemoni laki-laki yang menyebabkan terjadinya *women trafficking*. Tentunya karena kurangnya pemahaman, dan juga mayoritas laki-laki masih berpikir bahwasanya perempuan di India tidak terlalu penting dan berguna. Tentunya kasus-kasus yang berkaitan dengan ketidaksetaraan gender yang terjadi di India, seperti *women trafficking*, diskriminasi perempuan, dan gerakan gender. Hal ini disebabkan oleh hegemoni laki-laki, yang semestinya perempuan memiliki peran yang penting untuk dapat membantu laki-laki, namun tidak diberikan kesempatan (True 2005, 223).

Laki-laki disosialisasikan untuk mengidentifikasi diri sendiri, dengan cara membangun maskulinitas, seperti kekuatan, peran pelindung publik, yang pada akhirnya menjadi pelindung negara dengan membawa senjata. Sedangkan perempuan diajarkan untuk tunduk dan patuh sebagai istri, dan juga berlandung pada laki-laki untuk memberikan dukungan, yang dimana selain memiliki peran lain selain melindungi, juga sebagai penghasil ekonomi keluarga, seperti yang sudah dijelaskan bahwasanya, kontribusi sosial telah terbentuk lama yang dikarenakan oleh faktor sejarah, sehingga fondasi yang telah dibangun sejak lama berlangsung hingga sekarang. Organisasi dan aktivis ikut menyuarakan anti

women trafficking membuat dan memasukan perspektif kesetaraan gender untuk membantah dari stigma laki-laki, yang bahwasanya perempuan juga dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh laki-laki (True 2005, 226).

Pengelompokan antara laki-laki dan perempuan, membuat sebuah perbedaan yang sangat signifikan bagi gender. Sebagai bukti, sangat banyak laki-laki yang bekerja di tempat yang sangat layak, seperti perusahaan dan juga mendapatkan bayaran yang sangat berbeda dengan perempuan, meskipun perempuan berada di jabatan yang sama. Perempuan di India sangat susah untuk menunjukkan kualitas mereka di dunia kerja, karena kurangnya ruang setara untuk bekerja baik di pemerintah, maupun di perusahaan swasta.

Sejarah di India merupakan salah satu faktor yang membentuk sistem sosial patriarki laki-laki. Pembentukan hegemoni yang didasari oleh kekuatan laki-laki pada saat penjajah oleh Inggris, membuat laki-laki selalu di garda terdepan untuk dapat melindungi perempuan dan anak-anak. Perempuan yang hanya bisa mensupport laki-laki dengan secara tidak langsung, dan hanya dapat memberikan dukungan secara moral. Namun, karena power laki-laki sangatlah besar, sehingga dapat menyebabkan perbedaan sosial yang sangat signifikan diantara kedua gender.

Pengelompokan perbedaan perempuan dan laki-laki terjadi hingga sekarang, yang dimana perempuan masih dipandang hanya sebuah alat untuk melahirkan, sedangkan laki-laki merupakan peran utama dalam sosial. Faktanya yaitu sangat banyak perempuan yang berkompeten di bidangnya, bukan hanya sebagai alat yang diperlakukan seenaknya oleh laki-laki. Aktivis, pemerintah, maupun aktor yang ahli di bidang gender, membantu berkontribusi dalam

menjelaskan betapa penting stereotip ini harus diubah, karena *women trafficking* merupakan bentuk terakhir dari kekerasan yang didasarkan oleh gender. Laki-laki di India seolah mendapat impunitas, karena banyaknya kasus kasus *women trafficking* yang tidak mendapatkan penyelidikan lebih lanjut, dan bahkan perbatasan yang terlalu luas untuk dijaga menjadi salah satu faktor penyebab *women trafficking*. Dalam hal ini, berbatasan langsung dengan negara seperti Nepal dan Bangladesh memiliki resiko yang cukup tinggi. Karena banyaknya perempuan yang diperdagangkan dari kedua negara tersebut ke India. Disisi lain meski terdapat kerja sama antar negara untuk memperketat perbatasan, namun masih banyak titik-titik wilayah yang tidak mendapat penjagaan. Selain itu, sulitnya mencegah *women trafficking* di perbatasan juga dikarenakan seringnya perubahan jalur *women trafficking* yang dilakukan para agen. Sehingga pemetaan jalur yang sudah ada harus selalu dipantau dan disesuaikan dengan lapangan.

Negara dianggap kurang menjamin hak-hak perempuan dan juga tidak dapat menjamin keselamatan perempuan, baik di ruang publik maupun pribadi. Gerakan *we the women* 2018 merupakan salah satu bentuk kritik yang dilakukan oleh perempuan untuk pemerintah negara bagian dan juga pusat. bukan hanya tentang kesetaraan gender, maskulinitas, juga membahas *women trafficking* yang menjadi titik terakhir dari kekerasan gender. Dengan adanya gerakan *we the women* dapat memermalukan negara di mata internasional, karena keterlibatan aktivis feminis untuk menentang ketidaksetaraan gender akan berdampak baik kedepannya apabila memang dapat terjadi. Disisi lain dengan adanya gerakan gender akan membantu untuk meminta pertanggungjawaban dari pemerintah untuk menghukum pelaku kekerasan dan pembunuhan. Adanya gerakan feminis,

aktor, dan juga kebijakan yang dibuat, diharapkan dapat menciptakan perubahan sosial dan hukum untuk dapat menciptakan kesetaraan gender dan menghilangkan *women trafficking* dari bentuk kekerasan terparah.

Aktivis dan organisasi di India memperkuat kampanye tentang kesetaraan gender agar perempuan di mata publik itu sama statusnya dengan laki-laki untuk mencegah kekerasan dan *women trafficking*. Kehadiran perempuan semakin lama semakin meningkat di ruang publik, maka pemberdayaan sosial, politik, dan ekonomi harus lebih ditingkatkan untuk menghilangkan risiko yang sering terjadi di ruang publik. Selama ini perempuan di India tidak dapat memilih dari keinginan dan hak mereka, karena kebanyakan perempuan di sana telah ditentukan oleh laki-laki, sehingga perempuan di India bukan hanya dengan ingin memberantas *women trafficking* maupun meningkatkan kesetaraan gender. Melainkan perempuan juga ingin ada pilihan yang diberi untuk bertindak secara bebas dan tidak melanggar hukum.

Sehingga analisis mengenai variabel feminisme analitis ini, sesuai dengan apa yang terjadi di India mengenai konstruksi sosial yang membuat perempuan di India menjadi korban dari tindak kekerasan dan juga *women trafficking*. Analisis ini melihat hegemoni laki-laki yang membuat perempuan sangat sulit mendapatkan hak mereka sebagai warga negara yang demokrasi. Sudah banyak hal yang dilakukan oleh organisasi dan aktivis memperjuangkan perempuan dalam meningkatkan kualitas perempuan, agar tidak lagi dipandang sebelah mata oleh laki-laki.

Namun upaya demi upaya apabila laki-laki tidak dapat mengubah cara pandang mengenai perempuan, yang bahasanya konstruksi sosial ini salah.

Dengan bergeraknya perempuan dalam ingin mengubah konstruksi tersebut dapat membuat ancaman bagi perempuan itu sendiri. Perempuan di India sangat sulit untuk mendapatkan hak dan kebebasan. Meskipun banyak organisasi dan aktivis telah memberikan salah satu solusi untuk meningkatkan kesetaraan gender di setiap bidang, baik ekonomi, pendidikan, politik dan sosial budaya, namun peran-peran pemerintah daerah masih sangatlah kurang untuk memenuhi keinginan dari pemerintah.

Salah satunya di negara bagian yaitu Madhya Pradesh yang merupakan negara bagian yang paling tidak aman bagi perempuan, dengan jumlah kasus yang tinggi dan tingkat hukuman yang rendah, dimana *women trafficking* masih saja terjadi, dan bahkan sampai sekarang masih mengalami peningkatan. Upaya demi upaya telah dilakukan, namun masih dirasa gagal, dengan adanya kasus *women trafficking* yang masih terjadi, dan bukan hanya itu saja, pada dasarnya yang dapat mengubah konstruksi ini adalah masyarakat laki-laki itu sendiri. Meskipun dengan kebijakan yang dirasa sudah sangat bagus, namun implementasi dan juga bagaimana cara mengubah cara pandang laki-laki itu sendiri lah yang dapat mengubah konstruksi sosial.

Dapat disimpulkan dari variabel feminisme analitis, bahwasanya hegemoni dan maskulinitas laki-laki dapat mempengaruhi di segala aspek. Hal itu karena peluang lebih untuk perempuan. Seperti, mayoritas laki-laki bekerja sebagai karyawan di perusahaan dengan gaji yang tinggi dibandingkan perempuan dengan pekerjaan yang sama. Organisasi dan para aktivis-aktivis berusaha untuk memberikan peluang bagi perempuan, agar dapat kesempatan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh laki-laki. Gerakan demi gerakan dilakukan oleh

perempuan untuk mendapatkan keinginan hak mereka harus ditanggung dengan aksi *women trafficking* yang dilakukan oleh laki-laki (True 2005,227).

Dapat diasumsikan bahwasanya laki-laki tidak ingin hegemoni mereka setara dengan perempuan. Sehingga perempuan memiliki cara untuk menyetarakan gender di lingkup pemerintah, dengan cara memberikan kuota lebih perempuan untuk dapat bekerja di instansi negara. Dengan hal tersebut, dapat membuat perusahaan maupun lembaga lainnya dapat mengikuti cara yang dilakukan dalam menyetarakan gender.

3.3 Analisis Feminisme Normatif Dalam Menjelaskan Minimnya Kebijakan Pemerintah India terkait *Women Trafficking*

Feminisme normatif sebagai bagian dari agenda untuk perubahan global dalam sudut pandang gender. Dalam artian feminis normatif mempertanyakan makna, dan sebuah pandangan teoritis gender. Feminisme empiris dan analitis, memiliki peran yang sangat penting untuk titik awal mengubah stigma hierarki sosial yang terjadi, sehingga gender yang merupakan sebuah kategori jenis kelamin, dapat mendekonstruksi serta menghilangkan, seperti yang terjadi di tempat kerja (True 2005, 229).

Pembagian dua kelompok gender antara maskulin-feminis, menimbulkan pertanyaan dimana bagaimana hirarki gender dapat membentuk kekuasaan lain dalam dunia perpolitikan. Sebagai contoh, perempuan lebih terkenal dalam bidang perdamaian, kerja sama, maupun politik domestik, sedangkan laki-laki lebih terkenal dalam bidang persaingan, perang, maupun politik yang berskala internasional. Sehingga perspektif normatif ini, dengan adanya perbedaan gender, bukan hanya tentang hubungan antara laki-laki dan perempuan, melainkan ini

tentang sebuah pengetahuan di mana posisi hirarki dapat diketahui (True 2005,230).

Feminisme normatif memperkenalkan cara memandang gender dengan cara berbeda sesuai dengan situasi tatanan dunia saat ini. Hal ini juga menunjukkan, bahwasanya feminisme normatif memiliki banyak sudut pandang dalam melihat politik global, sehingga masing-masing dapat mengungkapkan realitas hubungan yang beragam. Feminisme normatif mengakui bahwa tidak ada tempat untuk memberikan suara atau pendapat, karena mereka dikonstruksi sejak lama membedakan identitas gender (True 2005, 232).

Feminisme normatif, apabila dikaitkan dengan kebijakan pemerintah India melakukan perubahan dan pengembangan yang diberikan ke negara untuk mengurangi *women trafficking* dan meningkatkan gender. Upaya yang dilakukan salah satunya adalah The trafficking of person (Prevention, Protection, and rehabilitation) bill 2018 adalah kebijakan utama pemerintah India pada tahun 2018 yang memberikan masukan arah dan kebijakan pada semua hal termasuk urusan perempuan. Pemerintah India juga telah menetapkan RUU Bharatiya Nyaya yaitu rancangan undang-undang hukum pidana India. RUU ini untuk meninjau perlindungan konstitusi dan hukum untuk perempuan, merekomendasikan langkah-langkah legislatif perbaikan, memfasilitasi penyelesaian keluhan dan memberi saran kepada pemerintah tentang semua masalah kebijakan yang mempengaruhi perempuan, agar kasus *women trafficking* yang berasal dari kekerasan gender dapat dituntaskan (India's Report: Beijing Declaration and Platform for Action, 2019).

Pemerintah India sangat melihat peluang perempuan di segala aspek, secara tidak langsung yang mengubah sudut pandang mengenai perempuan dan juga memberikan peluang kesetaraan terutama di dalam dunia kerja. Memberikan peluang perempuan di dalam dunia kerja merupakan sebuah kewajiban dari negara yang berbentuk demokrasi untuk menghargai seluruh HAM dari warga negara. Meningkatkan kesetaraan gender merupakan salah satu bentuk pengurangan *women trafficking* di India. Sebagai bentuk nyata dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah India.

Organisasi feminis dan aktivis-aktivis anti *women trafficking* dalam upaya menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan inklusif dalam mempromosikan kesetaraan gender. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya pemerintah India juga mendirikan kesatuan khusus yaitu Kepolisian lokal yang tidak mampu menangani melimpahkan ke AHTU yang kemudian hal ini ditindak lanjuti dengan investigasi menyeluruh, dari penyelidikan tempat pertama Tithi diperdagangkan hingga mengungkap penadah dari kasus perdagangan manusia di Gujarat yang akhirnya mendapat bukti kuat dan pelaku mendapatkan hukuman dalam persidangan. Dari sini dapat dilihat bawa kelemahan dari institusi di India yaitu terletak pada gerbang pertama laporan dari *women trafficking*. Adanya faktor *procedure* dan yurisdiksi dari kepolisian lokal membuat kasus dari *women trafficking* tidak ditangani secara cepat.

Sesuai dengan feminisme normatif, bahwasanya tidak ada tempat bagi perempuan untuk mengutarakan pendapat, dan bertindak sebagai perempuan yang sedang mengalami masalah (True 2005, 231-232). Sehingga, apabila dikaitkan dengan feminisme normatif, maka peran AHTU memberlakukan kesetaraan

gender adalah bentuk nyata dari perempuan memiliki tempat untuk bersuara. Bukan hanya karena hegemoni laki-laki yang melemahkan perempuan sehingga perempuan tidak dapat melakukan apa-apa. Akan tetapi masih banyak laki-laki dan juga aktivis gender lainnya yang ingin menunjukkan, bahwasanya peran perempuan itu sangat besar di luar sana, hanya dengan memberikan tempat yang sesuai dengan kemampuannya. Atas dasar kebencian terhadap perempuan, yang membuat timbulnya benih-benih diskriminasi, dan juga yang paling fatal yaitu *women trafficking* (True 2005, 231-232).

Pemerintah India sangat serius dalam ingin menangani kasus *women trafficking* dan ketidaksetaraan gender di India. Hingga seluruh aspek yang menurutnya masih sangat kurang harus diubah dan diperbaiki agar lebih baik lagi seperti di bidang tenaga kerja. Pemerintah India dalam kementerian pemberdayaan perempuan membuat langkah-langkah untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Reformasi ini mendorong undang-undang baru tentang hak-hak perempuan, salah satu hasilnya adalah peningkatan perlawanan laki-laki yang menentang. Tentunya dengan kebijakan, serta upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah India demi kebaikan India itu sendiri.

Dari perspektif feminisme normatif true menjelaskan meskipun India telah mengambil langkah-langkah penting dalam mengatasi *women trafficking*, pendekatan yang terlalu berfokus pada aspek kriminalisasi perlu diimbangi dengan upaya yang lebih besar dalam pemberdayaan dan rehabilitasi korban. Pendekatan yang lebih berbasis hak asasi manusia dan interseksional diperlukan untuk memastikan keadilan yang lebih holistik bagi korban *women trafficking*.

Meskipun undang-undang ini dianggap progresif, menurut feminisme normatif pendekatan yang terlalu kriminalisasi yaitu fokus utama pada hukuman pidana dapat mengabaikan kebutuhan rehabilitasi dan pemberdayaan korban. Kemudian, kurangnya pendekatan berbasis hak manusia yang belum ada sepenuhnya di undang-undang ini menempatkan korban sebagai subjek yang memiliki hak untuk dipulihkan dan diberdayakan. Keterbatasan dalam pendekatan interaksional seperti kurangnya perhatian terhadap faktor-faktor seperti ras, kelas sosial, dan status migrasi yang dapat mempengaruhi kerentanan terhadap *women trafficking* (True 2005, 228).

Kebijakan negara dalam mengatasi isu *women trafficking* menurut True seringkali lebih berorientasi pada keamanan negara seperti penegakan hukum, pengendalian perbatasan dari pada keamanan manusia terutama keamanan perempuan. Analisis kerjasama India dengan negara-negara seperti Bangladesh, Myanmar, dan UAE umumnya berfokus pada penindakan, repatriasi, dan perlindungan perbatasan, yang merupakan dimensi keamanan negara. Namun, dalam pandangan True, langkah-langkah ini belum cukup melindungi perempuan dari kekerasan struktural dan eksploitasi jang panjang, karena tidak mengatasi akar penyebab *trafficking* seperti kemiskinan, ketimpangan gender, dan ketergantungan ekonomi. serta kurang memberdayakan korban untuk hidup mandiri setelah penyelamatan (True 2005, 228).

Jacqui True mendorong pendekatan interseksional yang mempertimbangkan bagaimana gender, kelas, ras, dan status migran saling berkelindan dan membentuk kerentanan seseorang terhadap *women trafficking*. Menurut analisis True, kerjasama India secara umum belum menunjukkan bahwa

faktor-faktor ini dipertimbangkan secara serius dalam implementasi kebijakan. Contohnya, banyak korban trafficking adalah perempuan dari kasta rendah, suku-suku terpinggirkan, atau migran internal lintas negara bagian yang tidak memiliki dokumentasi yang legal. Sehingga, perempuan migran rentan menjadi korban eksploitasi seperti di UAE. Namun, perjanjian bilateral cenderung lebih berfokus pada deportasi atau penegakan hukum, bukan pada pemulihan trauma dan reintegrasi sosial. True menekankan bahwa pemberantasan trafficking bukan hanya menindak pelaku tetapi mengubah sistem yang membuat perempuan rentan tereksplorasi (True 2005, 231-232).

Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah India sudah dengan apa yang dijelaskan dalam variabel feminisme normatif. Karena pemerintah India mencoba untuk memberikan peluang bagi perempuan agar tidak dipandang sebelah mata lagi atas hegemoni laki-laki. Meningkatkan kesetaraan gender, maka tingkat *women trafficking* juga akan turun, karena faktor kunci utama untuk tidak terjadinya *women trafficking*, harus ada kesetaraan gender yang terjadi (True 2005,228). Sehingga upaya yang dilakukan pemerintah India dalam menanggulangi *women trafficking* dengan cara meningkatkan kesetaraan gender merupakan hal yang sesuai untuk meningkatkan kesetaraan gender merupakan hal yang sesuai untuk meningkatkan derajat perempuan, seperti yang dijelaskan di variabel feminisme normatif (True 2005, 234). Namun, hal tersebut sangatlah sulit terwujudkan selama ini karena melihat data yang terjadi dimana lonjakan *women trafficking* masih terjadi di India.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan teori feminisme oleh Jacqui True, *women trafficking* dapat terjadi karena adanya ketidaksetaraan gender yang terjadi. India sendiri, merupakan salah satu negara yang memiliki ketidaksetaraan gender tertinggi. Fenomena *women trafficking* ini sudah berlangsung sejak lama, dan bukan menjadi fenomena baru lagi, khususnya di negara India.

Melalui penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana pemerintah India memiliki peran yang bagus dalam meningkatkan kesetaraan gender dan menanggulangi *women trafficking* di India. Namun sesuai dengan data yang ditunjukkan, peningkatan *women trafficking* tetap saja terjadi. Sehingga dapat dikatakan pemerintah gagal dalam menanggulangi *women trafficking* di India. Hal tersebut menjadi sebuah kesalahan, karena peningkatan *women trafficking* malah makin meningkat drastis tahun ke tahun. Sehingga upaya apapun itu belum dapat mengubah kesetaraan apabila laki-laki masih belum dapat berpikir untuk menyetarakan gender, dan tidak menganggap kesetaraan gender itu sebagai ancaman bagi laki-laki. Dari penelitian ini, penulis menyimpulkan menjadi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1. Analisis Feminisme Empiris, Analitis, dan Normatif pada Kasus

Women Trafficking di India

Pendekatan Feminisme	Penjelasan menurut Jacqui True	Analisis Pada Kasus <i>Women Trafficking</i>
Empiris	Feminisme empiris menjelaskan cara pandang laki-laki terhadap perempuan di mana yang akan selalu dianggap lemah dan tidak memiliki peran sebagai laki-laki.	Dinamika <i>women trafficking</i> di India dikarenakan laki-laki dianggap lebih superior dibanding perempuan sehingga menciptakan kerentanan terhadap perempuan.
Analitis	Feminisme analitis menjelaskan bahwasanya hegemoni laki-laki membuat perempuan makin terpinggirkan. Sehingga perempuan yang tidak memiliki peluang yang sama seperti laki-laki, di mana laki-laki menguasai di segala bidang seperti ekonomi, politik, sosial	Kekerasan terhadap perempuan di India yang menyebabkan diskriminasi termasuk terjadinya <i>women trafficking</i> . Kegagalan India dalam menegakkan keadilan gender yang tidak hanya sebagai peristiwa individual, melainkan sebagai fenomena yang sistemik dan terstruktur. Contohnya modus perekrutan tenaga kerja palsu, dijanjikan pekerjaan namun dijual ke rumah bordil atau dipaksa menikah hingga mengalami kekerasan seksual.
Normatif	Feminisme normatif memiliki tujuan untuk perubahan global dengan sudut pandangan gender. Dalam hal ini, feminisme normatif sebagai bagian dari pelengkap dari variabel empiris dan analitis yang membahas mengenai sudut pandang dan hierarki yang terjadi pada laki-laki terhadap perempuan. Sehingga dibutuhkan adanya implementasi untuk dapat mengubah cara pandang tersebut.	Pemerintah India membuat kebijakan-kebijakan baru untuk menanggulangi adanya <i>women trafficking</i> . Namun, minimnya kebijakan pro-perempuan dan lemahnya pendekatan berbasis hak korban membuat kebijakan tersebut belum efektif. Penanggulangan <i>trafficking</i> di India harus lebih dari penegakan hukum, melainkan mencakup transformasi struktural yang berpihak pada perempuan.

Sumber: Diolah dari True (True 2005,213-231)

Analisis ketiga variabel feminisme empiris, analitis, dan juga normatif, dapat disimpulkan sebagai berikut. Feminisme empiris, membahas tentang stigma atau pandangan terhadap perempuan yang terjadi di India, dalam hal ini cara laki-laki melihat perempuan yang membuat perempuan makin terpinggirkan, Pemerintah sangat mendukung perempuan dan pro terhadap aktivis-aktivis feminis dan anti *women trafficking*, namun dengan adanya dukungan tersebut akan menjadi sebuah ancaman bagi laki-laki karena hegemoni mereka yang tidak ingin disamakan dengan perempuan.

Feminisme analitis, menjelaskan bahwasanya hegemoni laki-laki terbangun secara sosial sejak dulu. Hegemoni tersebut digunakan untuk kepentingan laki-laki, yang dalam artian, laki-laki dapat menindas perempuan karena menganggap superior. Sehingga *women trafficking* yang terjadi di India terjadi karena hierarki yang sampai saat ini tidak dapat diubah.

Feminisme normatif, dalam hal ini pemerintah India telah melakukan upaya untuk meningkatkan derajat perempuan, agar kasus seperti diskriminasi, hingga *women trafficking* tidak terulang kembali. Upaya untuk mengubah stigma dan juga hegemoni, merupakan sebuah upaya yang dilakukan agar perempuan dapat lebih mendapatkan hak-hak yang mereka inginkan. Meskipun kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk menanggulangi *women trafficking*. Pemerintah India, dengan tegas melakukan upaya untuk menanggulangi *women trafficking* dengan kebijakannya.

Selain itu, pemerintah India memasukkan perspektif gender, di semua bidang yang ada di pemerintahan India, serta mencoba memasukan perspektif gender dalam upaya penanganan di bidang non-negara. Namun pelaksanaan dan

pandangan dari laki-laki masih belum dapat diubah untuk menghargai perempuan, yang menyebabkan *women trafficking* masih akan terus ada.

2.2 Rekomendasi

Dengan adanya skripsi ini yang membahas tentang tinjauan aspek-aspek feminisme dalam Penanggulangan *women trafficking* di India. Penulis merekomendasikan bagi mahasiswa apabila ingin meneliti dengan menggunakan Teori Feminisme dari Jacqui True, yaitu dengan menganalisis tentang kesempatan penambahan kuota perempuan di pemerintahan India. Selain itu, penulis juga sangat merekomendasikan untuk meneliti kasus *women trafficking* di India saat ini, karena fenomena *women trafficking* yang masih berlanjut hingga sekarang di India.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Ansari, Bushra, and Sowmya Rajaram. 2024. "It's Women's Day, but on the ground, little has changed." Indian School of Development Management. <https://www.isdm.org.in/blog/its-womens-day-but-on-ground-little-has-changed>.
- Armandha, Semmy T. 2005. "Pemikiran feminisme dalam hubungan internasional." *hubungan internasional fisip universitas budi luhur*.
- Aziz, Sarah. 2023. "In India, Human Traffickers Target Tribal Women and Girls." VOA News. <https://www.voanews.com/a/in-india-human-traffickers-target-tribal-women-and-girls/7235083.html>.
- Backer, Mary. 1999. "Patriarchy and Inequality: Towards a Substantive Feminism." *University of Chicago Legal Forum*. <https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1266&context=uclf>.
- Bansal, Arpana. 2021. "A CRITICAL ANALYSIS OF HUMAN TRAFFICKING IN INDIA." *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)*. <https://doi.org/10.17762/turcomat.v12i1.12491>.
- Bhatnagar, Shreshth. 2022. "Prevalence of Prostitution & Women Trafficking in India: Hindrance to Fundamental Rights." *International Journal of Legal Science and Innovation* 4 (2): 27-38. <https://www.ijlsi.com/wp-content/uploads/Prevalence-of-Prostitution-Women-Trafficking-in-India.pdf>.

- Bhattacharya, Jayanta. 2023. "Human Trafficking: The Alarming Case of India's Missing Girls and Women." *Tatsat Chronicle Social Sector On Record*.
<https://tatsatchronicle.com/human-trafficking-the-alarming-case-of-indias-missing-girls-and-women/>.
- Bhattacharya, Jayanta. 2023. "Human Trafficking: The Alarming Case Of India's Missing Girls And Women."
- Effendi, Aulia R. 2019. "Akar permasalahan perempuan dalam dunia pendidikan dalam perspektif epistemologi feminis sandra harding." *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*.
- Elfitriani, Yori, and Yuli Fachari. 2015. "PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGGULANGI MASALAH WOMEN TRAFFICKING DI INDIA (2008-2013)." *JOM FISIP 2: 2*.
<https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/7548/7220>.
- Firmaliza, Cici A. 2014. "Strategi Organisasi Perempuan Anti Trafficking Apne Aap dalam Penanggulangan Isu Perdagangan Manusia Di India. 1." *Andalas Journal of International Studies 3*, no. 2..
- Ghosh, Sushmita. 2021. "Covid-19 made poor more vulnerable to child trafficking, say NGOs, India Today, New Delhi,." <https://www.indiatoday.in/coronavirus-outbreak/story/covid-19-poor-marginalised-vulnerability-child-trafficking-ngos-1812519-2021-06-08>.
- Girija, A. 2023. "IJARIE." *A Study on Operation MUSKAAN-Concept, Need, and Importance of Missing Children 2 (1)*.

- Goldsmith, Belinda, and Meka Beresford. 2018. "India most dangerous country for women with sexual violence rife - global poll." Reuters.
<https://www.reuters.com/article/world/india-most-dangerous-country-for-women-with-sexual-violence-rife-global-poll-idUSKBN1JM075/>.
- Harnoko, Bambang R. 2010. "MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender." *DI BALIK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN* 2:1.
["http://e-journal.stain pekalongan.ac.id/."](http://e-journal.stain.pekalongan.ac.id/) *Muwazah* 2.
- Hidayati, Nuril. 2018. "TEORI FEMINISME: SEJARAH, PERKEMBANGAN DAN RELEVANSINYA DENGAN KAJIAN KEISLAMAN KONTEMPORER." *Jurnal harkat : media komunikasi gender* 14:1.
- Irani, Smriti Z. 2021. "Nirbhaya Scheme." Ministry of Women and Child Development.
<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1743231>.
- Iyer, Saraswati R., and Radha. 2016. "Women trafficking in india - a critical analysis." *Journal of Arta, Science & Humanities*.
www.shanlaxjournals.in/pdf/ASH/V4N2/Ash_V4_N2_017.pdf.
- Jorgenson, Dale W. n.d. "Why Is India the Most Rapidly Growing Economy in the World?" Scholars at Harvard.
https://scholar.harvard.edu/files/jorgenson/files/16_1202_columbia_kotak.pdf.
- Kuppusamy, Damodaran. 2021. "Gender discrimination in India: an unresolved issue." *Social Sciences International Research* 7, no. 2 (November).

- Kurnia, Nining, Khairur Rizki, and Zulkarnain. 2023. "Keamanan Manusia dalam Pengaruh Tradisi Dowry di India terhadap Kekerasan Berbasis Gender di India." *Indonesian Journal of Global Discourse* 5:73-89.
- Luciana, Shinta. 2023. "Peran United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Mengatasi Women Trafficking Di India Pada Tahun 2018-2020."
- Lukitowati, Suci, Lucky Reza, Agita Pratiwi, and Nurul Awaliyah. 2017. "STUDI FEMINISME TERHADAP PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDIA." *Seminar Nasional Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*.
- Nuryantoro, Rafi. 2023. "Peningkatan Kasus Perdagangan Perempuan di India dalam Perspektif Feminisme." <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4688/>.
- Oktaviani, Jusmalia, and Siti M. Setiawati. 2017. "KEBIJAKAN PEMERINTAH INDIA DALAM MENGATASI MASALAH 'DOWRY DEATHS.'" *Dinamika Global* 2.
<https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/34/21>.
- Ollus, Natalia, and Sami Nevala. 2001. "Women in the criminal justice system : international examples & national responses." *European Institute for Crime Prevention and Control, affiliate with the United Nations (HEUNI)*, 116.
http://old.heuni.fi/material/attachments/heuni/reports/6KjPF9f7n/Women_in_CJS.pdf.

- Pahlawan, Indra, and Sari E. Darma. 2016. "Peran United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Dalam Mencegah Bride Trafficking Di India Tahun 2011-2014." *JOM FISIP*, (februari).
<https://www.neliti.com/publications/33132/peran-united-nations-office-on-drugs-and-crime-unodc-dalam-mencegah-bride-traffi>.
- Pal, Bhaswati, and Tarun K. Modal. 2021. "Women's trafficking in twenty-first century India: A quest for regional variations." *Asian Journal of Women's Studies* 27 (Maret): 130-151.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/12259276.2021.1887560>.
- Panda, Anikit. 2019. "India, Sri Lanka Conclude Agreement on Countering Drug and Human Trafficking." *The Diplomat – Asia-Pacific Current Affairs Magazine*, April 9, 2019.
<https://thediplomat.com/2019/04/india-sri-lanka-conclude-agreement-on-countering-drug-and-human-trafficking/>.
- Pratiwi, Wiwik S., Alfian Hidayat, and Khairur Rizki. 2021. "Implementasi CEDAW di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry." *Indonesian Journal of Global Discourse* 3:55 - 80.
- Sabirin. 2017. "Perdagangan Perempuan dengan Dalih Perkawinan." *Jurnal Studi Gender dan Anak*.
- Sahni, Rohini, V. K. Shankar, and Hemant Apte. 2008. "Prostitution and beyond: An analysis of sex work in India." *SAGE Publications Inc*, 49.
https://www.researchgate.net/publication/329157024_Prostitution_and_beyond_An_analysis_of_sex_work_in_India.

Sarkar, Siddhartha. 2020. "Sex Trafficking in India: The Politics and Effects of COVID 19 Pandemic."

Smith, Sarah. 2018. "Introducing Feminism in International Relations Theory." *E-International Relations*.

Suwarno, Fatma Yusuf E. 2020. "Perdagangan Perempuan Nepal ke India dan Peran Jejaring Feminis Transnasional." *Nation State: Journal of International Studies* 3:2.

Vidushy, Vimal. 2016. "Human trafficking In India: An analysis." *International Journal of Applied Research*.

Buku

Burchill, Scott, Andrew Linklater, Richard Devetak, Jack Donnelly, Matthew Paterson, Christian R. Smit, and Jacqui True. 2005. "Theories of international relations." (Palgrave Macmillan).

True, Jacqui. 2005. *Theories of International Relation*. Feminisme ed. Vol. 216. N.p.: New York: Palgrave Macmillan.

Artikel Daring

Canton, Naomi. 2018. "Thomson Reuters survey: India most dangerous nation for women | India News." Times of India.

<https://timesofindia.indiatimes.com/india/india-most-dangerous-nation-for-women-poll/articleshow/64743289.cms>.

Fiinovation. 2018. "Govt Report Suggests Almost 20.000 Women and Children Trafficked in India in 2016."

India population (2024) live — Countrymeters." n.d. Countrymeters.
<https://countrymeters>

- Invisible Girl Project. 2022. “4 key takeaways about India from the 2022 TIP Report.”
https://invisiblegirlproject.org/rice/trafficking/4-key-takeaways-about-india-from-the-2022-tip-report/.info/en/India#google_vignette.
- McCarthy, Niall. 2018. “The Ten Countries Where It’s Worst to be Female.” Thomson Reuters Foundation, Statista Charts.
- Ministry of External Affairs, Government of India. 2019. “India, Myanmar to jointly tackle human trafficking.”
<https://indbiz.gov.in/india-myanmar-to-jointly-tackle-human-trafficking/>.
- Mohapatra, Debabrata. 2023. “Victims of trafficking highest in Odisha NCRB.” Desember 5, 2023.
<https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/odisha-tops-list-for-highest-number-of-human-trafficking-victims-ncrb-report/articleshow/105741508.cms>.
- Pratiwi, Stefani I. 2022. “Negara-negara dengan Perdagangan Manusia Terbanyak di Dunia” *SindoNews*, juli 21, 2022.
<https://international.sindonews.com/read/832303/40/negara-negara-dengan-perdagangan-manusia-terbanyak-di-dunia-1658344046>.
- PMINDIA. 2016. “MoU between India and UAE on cooperation in preventing and combating of Human Trafficking.” April 13, 2016.
- PRS India. 2018. “The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018.” Prsindia.org.
<https://prsindia.org/billtrack/the-trafficking-of-persons-prevention-protection-and-rehabilitation-bill-2018>.

- PRS Legislative Research. 2024. "The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2018." PRS Legislative Research.
<https://prsindia.org/billtrack/the-trafficking-of-persons-prevention-protecti-on-and-rehabilitation-bill-2018>.
- Singh, Abhay. 2024. "No. of trafficking victims rescued rises 22% in 2023."
<https://timesofindia.indiatimes.com/city/delhi/increase-in-rescued-trafficki-ng-victims-by-22-in-2023/articleshow/109739638.cms>
- Social Justice. 2023. "Rehabilitation Scheme for Victims of Trafficking."
<https://www.drishtiiias.com/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/06-07-2023>.
- Statista. 2022. "Number of Reported Human Trafficking Cases in India 2021 by State." Statista Research Department, Crime & Law Enforcement.
<https://www.statista.com/statistics/633086/reported-human-trafficking-cases-by-state-india/>.
- US Department of State. 2018. "India Trafficking in Person Report."
<https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/india/#:~:text=TRAFFICKING%20PROFILE-,INDIA%3A%20Tier%202,India%20remained%20on%20Tier%202>.
- United Nations Volunteers. 2024. "Online Volunteers support We the Women campaign in 185 countries." United Nations Volunteers.
<https://www.unv.org/Success-stories/online-volunteers-support-we-women-campaign-185-countries>.

Xinhua. 2020. "Human trafficking of women, children in Indian states on rise
Indian states on rise." www.xinhuanet.com.

http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/04/c_138755649.htm.